



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 219);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 255);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Surplus APBD adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
15. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
19. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
20. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
21. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

23. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp37.351.965.310.884,00 bertambah sebesar Rp172.025.385.510,00 sehingga menjadi sebesar Rp37.523.990.696.394,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
semula Rp35.918.605.827.078,00
bertambah Rp 368.685.948.223,00
Jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan Rp36.287.291.775.301,00
- b. Belanja Daerah
semula Rp36.785.159.275.740,00
bertambah Rp120.025.385.510,00
Jumlah Belanja Daerah
setelah perubahan Rp36.905.184.661.250,00
Surplus/(Defisit) Rp(617.892.885.949,00)
- c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
semula Rp1.433.359.483.806,00
berkurang Rp196.660.562.713,00
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan setelah
perubahan Rp1.236.698.921.093,00
2. Pengeluaran Pembiayaan
semula Rp566.806.035.144,00
bertambah Rp52.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan Rp618.806.035.144,00
Pembiayaan Neto Rp617.892.885.949,00
SILPA Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. PAD
semula Rp25.192.895.004.117,00
berkurang Rp310.686.384.416,00
Jumlah PAD setelah
perubahan Rp24.882.208.619.701,00
- b. Pendapatan Transfer
semula Rp10.696.482.154.600,00
bertambah Rp685.406.225.000,00
Jumlah Pendapatan
Transfer setelah perubahan Rp11.381.888.379.600,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
semula Rp29.228.668.361,00
berkurang Rp6.033.892.361,00

Jumlah Lain-lain
Pendapatan Daerah yang
Sah setelah perubahan Rp23.194.776.000,00

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
 - semula Rp23.426.514.379.249,00
 - berkurang Rp348.484.885.273,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp23.078.029.493.976,00
 - b. Retribusi Daerah
 - semula Rp699.466.990.367,00
 - bertambah Rp101.251.934.122,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp800.718.924.489,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - semula Rp406.230.214.675,00
 - bertambah Rp24.365.540.600,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp430.595.755.275,00
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
 - semula Rp660.683.419.826,00
 - berkurang Rp87.818.973.865,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp572.864.445.961,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - semula Rp10.696.482.154.600,00
 - bertambah Rp685.406.225.000,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp11.381.888.379.600,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
Pendapatan Hibah
 - semula Rp29.228.668.361,00
 - berkurang Rp6.033.892.361,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp23.194.776.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
 - semula Rp20.670.609.950.393,00
 - berkurang Rp 58.121.182.892,00
 - Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp20.612.488.767.501,00
- b. Belanja Modal
 - semula Rp2.150.927.020.229,00
 - bertambah Rp35.278.085.401,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp2.186.205.105.630,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 - semula Rp321.817.184.573,00
 - bertambah Rp49.019.814.648,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp370.836.999.221,00
- d. Belanja Transfer
 - semula Rp13.641.805.120.545,00
 - bertambah Rp93.848.668.353,00
 - Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp13.735.653.788.898,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai
 - semula Rp8.359.140.420.918,00
 - berkurang Rp88.238.175.711,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp8.270.902.245.207,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - semula Rp7.013.849.674.129,00
 - bertambah Rp18.658.442.357,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp7.032.508.116.486,00
 - c. Belanja Subsidi
 - semula Rp15.000.000.000,00
 - bertambah/
(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp15.000.000.000,00
 - d. Belanja Hibah
 - semula Rp5.214.632.273.946,00
 - bertambah Rp11.458.550.462,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp5.226.090.824.408,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial
 - semula Rp67.987.581.400,00
 - Bertambah/
(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp67.987.581.400,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah
 - semula Rp15.599.830.000,00
 - berkurang Rp6.282.890.000,00
 - Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp9.316.940.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - semula Rp720.685.410.166,00
 - bertambah Rp110.120.135.697,00
 - Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp830.805.545.863,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - semula Rp476.288.600.039,00
 - bertambah Rp4.309.671.390,00
 - Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp480.598.271.429,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
 - semula Rp771.773.337.001,00
 - berkurang Rp62.045.340.777,00
 - Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp709.727.996.224,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - semula Rp156.361.098.623,00
 - berkurang Rp4.538.634.909,00
 - Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp151.822.463.714,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
 - semula Rp10.218.744.400,00
 - berkurang Rp6.284.856.000,00
 - Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp3.933.888.400,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
 - semula Rp321.817.184.573,00
 - bertambah Rp49.019.814.648,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp370.836.999.221,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - semula Rp10.083.698.257.477,00
 - bertambah Rp171.495.287.353,00
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp10.255.193.544.830,00

b.	Belanja Bantuan Keuangan	
	semula	Rp3.558.106.863.068,00
	berkurang	Rp77.646.619.000,00
	Jumlah Belanja	
	Bantuan Keuangan	
	setelah perubahan	Rp3.480.460.244.068,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a.	Penerimaan Pembiayaan	
	semula	Rp1.433.359.483.806,00
	berkurang	Rp196.660.562.713,00
	Jumlah Penerimaan	
	Pembiayaan setelah	
	perubahan	Rp1.236.698.921.093,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
	semula	Rp566.806.035.144,00
	bertambah	Rp52.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran	
	Pembiayaan setelah	
	perubahan	Rp618.806.035.144,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
	semula	Rp997.148.975.719,00
	berkurang	Rp196.742.193.748,00
	Jumlah Sisa Lebih	
	Perhitungan Anggaran	
	Tahun Sebelumnya	
	setelah perubahan	Rp800.406.781.971,00
b.	Pencairan Dana Cadangan	
	semula	Rp436.210.508.087,00
	Bertambah/ (berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pencairan Dana	
	Cadangan setelah	
	perubahan	Rp436.210.508.087,00
c.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
	semula	Rp0,00
	bertambah	Rp81.631.035,00
	Jumlah Penerimaan	
	Kembali Pemberian	
	Pinjaman Daerah	
	setelah perubahan	Rp81.631.035,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a.	Penyertaan Modal Daerah	
	semula	Rp0,00
	bertambah	Rp52.000.000.000,00
	Jumlah Penyertaan	
	Modal Daerah setelah	
	perubahan	Rp52.000.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula	Rp566.806.035.144,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp0,00
Jumlah Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp566.806.035.144,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yang anggarannya belum dan/atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Keperluan mendesak diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk bantuan untuk daerah lain yang dilanda bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Pasal 10

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I, memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II, memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- c. Lampiran III, memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV, memuat rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V, memuat rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI, memuat rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII, memuat sinkronisasi program pada RPD dengan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII, memuat Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX, memuat sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X, memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI, memuat daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII, memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII, memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV, memuat daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV, memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI, memuat daftar pinjaman daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (12-272/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



YOGI GAUTAMA JAELANI, SH., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730624 199803 1 008

PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.192.895.004.117	24.882.208.619.701	(310.686.384.416)	1 %
4.1.01	Pajak Daerah	23.426.514.379.249	23.078.029.493.976	(348.484.885.273)	1 %
4.1.02	Retribusi Daerah	699.466.990.367	800.718.924.489	101.251.934.122	14 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	406.230.214.675	430.595.755.275	24.365.540.600	6 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	660.683.419.826	572.864.445.961	(87.818.973.865)	13 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	10.696.482.154.600	11.381.888.379.600	685.406.225.000	6 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.696.482.154.600	11.381.888.379.600	685.406.225.000	6 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.228.668.361	23.194.776.000	(6.033.892.361)	21 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	29.228.668.361	23.194.776.000	(6.033.892.361)	21 %
	Jumlah Pendapatan	35.918.605.827.078	36.287.291.775.301	368.685.948.223	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	20.670.609.950.393	20.612.488.767.501	(58.121.182.892)	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	8.359.140.420.918	8.270.902.245.207	(88.238.175.711)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.013.849.674.129	7.032.508.116.486	18.658.442.357	0 %
5.1.04	Belanja Subsidi	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	5.214.632.273.946	5.226.090.824.408	11.458.550.462	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	67.987.581.400	67.987.581.400	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	2.150.927.020.229	2.186.205.105.630	35.278.085.401	2 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.599.830.000	9.316.940.000	(6.282.890.000)	40 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	720.685.410.166	830.805.545.863	110.120.135.697	15 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	476.288.600.039	480.598.271.429	4.309.671.390	1 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	771.773.337.001	709.727.996.224	(62.045.340.777)	8 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	156.361.098.623	151.822.463.714	(4.538.634.909)	3 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.218.744.400	3.933.888.400	(6.284.856.000)	62 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	321.817.184.573	370.836.999.221	49.019.814.648	15 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	321.817.184.573	370.836.999.221	49.019.814.648	15 %
5.4	BELANJA TRANSFER	13.641.805.120.545	13.735.653.788.898	93.848.668.353	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.083.698.257.477	10.255.193.544.830	171.495.287.353	2 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	3.558.106.863.068	3.480.460.244.068	(77.646.619.000)	2 %
	Jumlah Belanja	36.785.159.275.740	36.905.184.661.250	120.025.385.510	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(866.553.448.662)	(617.892.885.949)	248.660.562.713	-29 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.433.359.483.806	1.236.698.921.093	(196.660.562.713)	14 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	997.148.975.719	800.406.781.971	(196.742.193.748)	20 %
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	436.210.508.087	436.210.508.087	0	0 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	81.631.035	81.631.035	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.433.359.483.806	1.236.698.921.093	(196.660.562.713)	14 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	566.806.035.144	618.806.035.144	52.000.000.000	9 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	52.000.000.000	52.000.000.000	100 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	566.806.035.144	566.806.035.144	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	566.806.035.144	618.806.035.144	52.000.000.000	9 %
	Pembiayaan Netto	866.553.448.662	617.892.885.949	(248.660.562.713)	29 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	668.595.136.729	13.334.740.573.185	1.754.469.919.709	0	0	15.089.210.492.894	787.901.134.056	13.527.064.496.233	1.767.028.126.265	0	0	15.294.092.622.498
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	56.856.862.278	18.325.783.095.378	837.268.320.110	0	0	11.163.051.415.488	28.183.498.410	10.215.349.889.293	868.099.141.994	0	0	11.075.449.831.287
1 01 1.01.000.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	56.856.862.278	6.571.728.552.632	815.428.573.483	0	0	7.387.157.126.115	28.103.498.410	6.537.609.040.585	841.162.389.345	0	0	7.376.771.429.930
1 01 1.01.000.0.00.01.0001	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH I	0	480.173.726.620	0	0	0	480.173.726.620	0	480.786.321.754	0	0	0	480.786.321.754
1 01 1.01.000.0.00.01.0002	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH II	0	272.403.192.066	0	0	0	272.403.192.066	0	268.325.400.667	49.347.900	0	0	268.974.748.567
1 01 1.01.000.0.00.01.0003	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH III	0	476.810.340.968	6.657.508.860	0	0	483.467.849.828	0	476.707.878.367	6.773.937.328	0	0	483.431.815.695
1 01 1.01.000.0.00.01.0004	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IV	0	310.611.165.867	4.923.674.500	0	0	315.534.840.367	0	353.067.537.860	6.056.040.800	0	0	359.123.578.666
1 01 1.01.000.0.00.01.0005	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH V	0	282.656.679.685	92.258.380	0	0	282.748.958.065	0	182.729.062.000	104.258.380	0	0	182.827.320.386
1 01 1.01.000.0.00.01.0006	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VI	0	294.706.524.111	672.374.695	0	0	295.578.898.806	0	291.434.851.179	412.800.303	0	0	291.846.851.482
1 01 1.01.000.0.00.01.0007	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VII	0	274.747.928.375	174.154.482	0	0	274.922.082.857	0	266.926.447.454	253.729.482	0	0	267.180.176.936
1 01 1.01.000.0.00.01.0008	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH VIII	0	336.639.891.187	918.574.300	0	0	337.558.465.487	0	331.720.358.684	1.737.205.790	0	0	333.457.564.474
1 01 1.01.000.0.00.01.0009	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH IX	0	212.124.636.824	655.312.500	0	0	212.779.949.324	0	203.475.628.449	489.512.500	0	0	203.987.140.949
1 01 1.01.000.0.00.01.0010	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH X	0	276.627.008.949	680.222.000	0	0	277.307.230.949	0	269.290.280.781	823.650.370	0	0	270.113.931.151
1 01 1.01.000.0.00.01.0011	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XI	0	209.045.773.740	107.037.000	0	0	209.152.810.740	0	205.067.347.059	0	0	0	205.067.347.059
1 01 1.01.000.0.00.01.0012	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XII	0	196.803.630.356	446.110.810	0	0	197.309.741.166	0	194.297.190.653	161.441.650	0	0	194.458.622.303
1 01 1.01.000.0.00.01.0013	CABANG PENDIDIKAN WILAYAH XIII	0	127.769.398.820	514.310.000	0	0	128.283.708.820	0	125.302.413.420	376.055.400	0	0	125.678.468.820
1 01 1.01.000.0.00.01.0014	UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	0	3.238.442.000	352.750.000	0	0	3.591.192.000	0	3.220.641.775	295.233.930	0	0	3.515.875.705
1 01 1.01.000.0.00.01.0015	SMKN 1 CIRIHING KAB. BOGOR	0	1.210.960.000	107.000.000	0	0	1.317.960.000	0	1.037.891.000	86.565.000	0	0	1.124.456.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0016	SMKN 3 KOTA BOGOR	0	596.645.000	600.000.000	0	0	1.196.645.000	0	864.100.000	15.000.000	0	0	879.100.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0017	SMKN 1 KOTA DEPOK	0	772.535.500	167.876.500	0	0	940.412.000	0	118.135.000	0	0	0	118.135.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0018	SMKN 1 KOTA BEKASI	0	1.058.640.000	0	0	0	1.058.640.000	0	352.445.000	0	0	0	352.445.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0019	SMKN 1 CIBAPANG BARAT KAB. BEKASI	0	564.956.000	54.924.000	0	0	619.880.000	0	564.956.000	54.924.000	0	0	619.880.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0020	SMKN 1 KARAWANG	0	1.378.734.000	0	0	0	1.378.734.000	0	1.155.000.000	0	0	0	1.155.000.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0021	SMKN 1 PURWAKARTA	0	1.074.520.000	0	0	0	1.074.520.000	0	694.850.000	0	0	0	694.850.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0022	SMKN 2 SUBANG	0	4.491.495.879	0	0	0	4.491.495.879	0	3.319.000.000	0	0	0	3.319.000.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0023	SMKN 1 KOTA SUKABUMI	0	953.652.500	423.425.000	0	0	1.377.077.500	0	518.819.800	326.108.700	0	0	844.928.500
1 01 1.01.000.0.00.01.0024	SMKN 1 CIRADAK KAB. SUKABUMI	0	1.891.691.000	340.000.000	0	0	2.231.691.000	0	1.517.800.000	0	0	0	1.517.800.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0025	SMKN 1 PACET KAB. CIANJUR	0	12.918.271.800	89.000.000	0	0	12.407.271.800	0	2.795.600.000	89.000.000	0	0	2.824.600.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0026	SMK PPN LEMBANG KAB. BANDUNG BARAT	0	470.885.000	0	0	0	470.885.000	0	201.017.000	0	0	0	201.017.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0027	SMKN 2 KOTA BANDUNG	0	1.623.371.000	127.500.000	0	0	1.750.871.000	0	66.610.000	20.000.000	0	0	86.610.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0028	SMKN 3 KOTA BANDUNG	0	1.172.511.000	489.531.000	0	0	1.662.042.000	0	994.755.000	284.531.000	0	0	1.279.286.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0029	SMKN 6 KOTA BANDUNG	0	231.100.000	1.203.000.000	0	0	1.434.100.000	0	326.000.000	54.700.000	0	0	380.700.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0030	SMKN 9 KOTA BANDUNG	0	1.784.640.000	79.000.000	0	0	1.863.640.000	0	1.192.370.000	66.500.000	0	0	1.258.870.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0031	SMKN 11 KOTA BANDUNG	0	948.883.800	170.009.200	0	0	1.118.893.000	0	591.441.550	12.430.210	0	0	603.871.760
1 01 1.01.000.0.00.01.0032	SMKN 1 KOTA CIMAHI	0	1.465.337.250	122.040.000	0	0	1.587.377.250	0	565.473.000	8.527.000	0	0	573.999.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0033	SMKN 5 PANGALENGAN KAB. BANDUNG	0	502.349.500	0	0	0	502.349.500	0	402.349.500	0	0	0	402.349.500
1 01 1.01.000.0.00.01.0034	SMKN 1 SUMEDANG	0	343.837.000	0	0	0	343.837.000	0	337.837.000	6.000.000	0	0	343.837.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0035	SMKN 1 MAJALENKA	0	743.900.000	137.500.000	0	0	881.400.000	0	251.355.000	19.665.000	0	0	271.020.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0036	SMKN 1 LOSARANG KAB. INDRAMAYU	0	349.050.000	0	0	0	349.050.000	0	328.700.000	0	0	0	328.700.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0037	SMKN 1 KOTA CIREBON	0	1.202.162.500	308.800.000	0	0	1.510.962.500	0	823.160.000	294.800.000	0	0	1.117.960.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0038	SMKN 1 MUNDU CIREBON	0	2.343.312.500	145.687.500	0	0	2.489.000.000	0	1.395.750.000	53.250.000	0	0	1.449.000.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0039	SMKN 1 KUNINGAN	0	777.457.000	0	0	0	777.457.000	0	76.580.000	0	0	0	76.580.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0040	SMKN 3 KUNINGAN	0	947.800.000	0	0	0	947.800.000	0	100.455.000	0	0	0	100.455.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0041	SMKN 1 GARUT	0	1.464.350.000	26.500.000	0	0	1.490.850.000	0	1.154.000.000	58.000.000	0	0	1.212.000.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0042	SMKN 2 GARUT	0	1.437.975.000	0	0	0	1.437.975.000	0	769.950.000	0	0	0	769.950.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0043	SMKN 4 GARUT	0	1.695.789.349	0	0	0	1.695.789.349	0	115.240.000	0	0	0	115.240.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0044	SMKN 1 KOTA TASIKMALAYA	0	455.408.000	0	0	0	455.408.000	0	495.655.000	0	0	0	495.655.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0045	SMKN 2 KOTA TASIKMALAYA	0	610.470.100	198.029.900	0	0	808.500.000	0	175.152.600	767.400	0	0	175.920.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0046	SMKN 1 RAJAPOLAH KAB. TASIKMALAYA	0	470.350.000	316.850.000	0	0	787.200.000	0	288.451.500	52.770.500	0	0	341.222.000
1 01 1.01.000.0.00.01.0047	SMKN 1 CIAMIS	0	706.570.000	400.430.000	0	0	1.107.000.000	0	618.776.450	0	0	0	618.776.450
1 01 1.01.000.0.00.01.0048	SMKN 1 KOTA BANJAR	0	531.551.500	143.356.000	0	0	674.907.500	0	258.476.200	0	0	0	258.476.200
1 01 1.01.000.0.00.01.0049	SMKN 1 PANGANDARAN	0	1.041.041.000	0	0	0	1.041.041.000	0	588.700.000	0	0	0	588.700.000
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	605.124.674.451	1.920.334.712.100	122.986.236.962	0	0	2.043.320.948.882	752.282.735.646	2.199.939.541.625	171.314.841.202	0	0	2.371.254.382.827
1 02 1.02.000.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	8.901.204.161	1.198.303.292.859	2.545.302.218	0	0	1.200.848.595.077	10.885.337.543	1.141.482.254.319	4.740.395.202	0	0	1.146.172.649.521
1 02 1.02.000.0.00.01.0001	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	0	20.337.537.109	8.672.160.000	0	0	29.009.697.109	0	20.941.897.350	18.264.867.765	0	0	39.206.765.115
1 02 1.02.000.0.00.01.0002	UPTD PELATIHAN KESEHATAN	0	7.247.645.272	187.860.785	0	0	7.435.506.057	0	5.979.704.746	487.612.426	0	0	6.467.317.172
1 02 1.02.000.0.00.01.0003	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK GARUT	43.566.174.646	62.517.915.914	11.678.308.732	0	0	74.196.224.646	43.566.174.646	67.459.373.302	14.049.581.151	0	0	81.508.954.458
1 02 1.02.000.0.00.01.0004	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT	8.491.462.407	36.554.463.920	6.386.090.700	0	0	42.941.154.620	11.759.054.507	36.250.278.372	8.730.569.340	0	0	44.980.847.712
1 02 1.02.000.0.00.01.0005	UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON SUKABUMI	65.808.956.387	82.885.417.387	17.360.73									

PROVINSI JAWA BARAT
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DILASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	BARAT													
1 02	UPTD RUMAH SAKIT PABU PROVPNSI JAWA BARAT	14.214.795.797	29.672.671.586	39.572.500.000	0	0	69.345.171.586	15.140.300.000	49.253.503.456	25.942.799.594	0	0	75.196.303.050	
1 02	RSUD AL IHSAN	425.721.649.000	436.754.988.240	16.587.678.103	0	0	453.342.266.343	540.124.549.000	685.218.700.602	37.770.884.103	0	0	722.989.584.705	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.617.680.000	661.937.958.648	770.545.871.195	0	0	1.432.482.929.843	2.617.908.000	700.604.528.248	713.945.925.178	0	0	1.414.550.453.426	
1 03	Dinas Bina Marga dan Perataan Ruang	2.600.000.000	139.683.785.542	36.088.258.009	0	0	175.772.043.551	2.600.000.000	138.387.874.147	33.120.139.955	0	0	171.508.014.102	
1 03	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN I	0	52.735.848.762	105.853.102.178	0	0	158.588.950.940	0	55.948.742.346	36.135.408.437	0	0	152.084.150.783	
1 03	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN II	0	35.488.072.887	92.940.562.262	0	0	128.428.635.149	0	42.750.219.189	87.406.126.796	0	0	130.156.345.985	
1 03	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN III	0	65.117.794.080	151.800.104.755	0	0	216.917.898.895	0	72.780.297.897	191.956.519.307	0	0	204.656.811.144	
1 03	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN IV	0	37.943.183.500	114.928.178.873	0	0	152.871.362.373	0	43.579.296.910	106.146.848.907	0	0	149.726.145.817	
1 03	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN V	0	30.219.090.087	76.485.806.659	0	0	106.705.576.746	0	35.159.269.111	74.553.418.459	0	0	109.712.687.570	
1 03	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PELAYANAN VI	0	39.474.537.473	98.923.956.110	0	0	138.398.493.589	0	45.736.628.767	103.345.419.674	0	0	149.082.058.441	
1 03	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	0	4.067.598.205	1.932.401.795	0	0	6.000.000.000	0	3.950.527.529	2.028.472.471	0	0	5.980.000.000	
1 03	Dinas Sumber Daya Air	17.600.000	89.806.107.338	4.283.325.068	0	0	94.149.432.406	17.900.000	94.844.841.621	4.326.258.860	0	0	99.171.108.481	
1 03	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIMULAN-CILAKI	0	17.075.622.766	16.599.966.764	0	0	33.635.589.530	0	17.168.571.388	15.224.194.217	0	0	32.392.765.605	
1 03	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIPARUM	0	28.046.185.107	14.855.799.536	0	0	42.901.984.643	0	27.818.847.507	13.049.643.536	0	0	40.868.491.038	
1 03	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CISADIA-CIBARENO	0	16.500.543.197	5.868.923.500	0	0	22.369.466.757	0	16.349.416.699	5.920.290.155	0	0	22.269.714.854	
1 03	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CILWUNG-CISADANE	0	17.431.352.307	13.501.965.500	0	0	30.933.315.807	0	17.237.168.416	13.083.464.691	0	0	30.240.633.107	
1 03	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIPANDUY	0	12.580.368.358	12.616.095.220	0	0	25.196.433.578	0	12.295.002.865	8.659.266.236	0	0	20.954.269.101	
1 03	UPTD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI CIPANJUK-CISANGGARUNG	0	28.526.214.383	345.126.900	0	0	28.871.341.283	0	28.300.944.797	492.470.566	0	0	28.793.415.363	
1 03	Dinas Perumahan dan Permukiman	0	47.180.154.656	23.562.250.000	0	0	70.742.404.656	0	48.376.689.124	18.576.980.911	0	0	66.953.650.035	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.864.080.000	169.869.355.458	5.589.507.910	0	0	175.458.863.368	4.844.400.000	167.688.758.239	5.529.360.463	0	0	173.218.118.702	
1 04	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.864.000.000	158.601.101.892	5.257.702.276	0	0	163.858.863.368	4.844.400.000	153.840.455.968	5.275.153.829	0	0	159.115.609.797	
1 04	UPTD PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN JAWA BARAT	0	11.268.254.366	331.745.634	0	0	11.600.000.000	0	13.848.302.271	254.206.694	0	0	14.102.508.965	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	83.451.354.438	3.654.608.665	0	0	87.105.963.103	0	76.505.839.577	864.406.426	0	0	77.370.246.003	
1 05	Satuan Polisi dan Patroli Praja	0	45.506.400.838	3.011.009.400	0	0	48.517.470.238	0	42.624.183.421	159.733.423	0	0	42.783.916.844	
1 05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	37.944.953.600	643.539.265	0	0	38.588.492.865	0	33.881.656.156	704.673.003	0	0	34.586.329.159	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	42.600.000	173.364.897.163	14.425.374.927	0	0	187.790.372.890	42.600.000	166.975.939.251	15.274.451.002	0	0	182.250.390.253	
1 06	Dinas Sosial	42.600.000	113.741.002.660	7.569.549.990	0	0	121.310.552.650	42.600.000	110.868.732.018	8.304.701.680	0	0	119.173.433.698	
1 06	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRUYA BINA REMAJA	0	5.718.064.042	1.128.236.000	0	0	6.846.300.042	0	4.914.980.413	1.221.893.000	0	0	6.136.874.213	
1 06	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRUYA BINA KARVA	0	6.136.117.231	1.012.330.981	0	0	7.148.148.212	0	6.076.170.926	1.007.208.081	0	0	7.083.679.007	
1 06	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRUYA BINA KARSJA	0	4.261.394.083	942.120.800	0	0	5.203.514.083	0	4.169.891.083	962.650.000	0	0	5.132.541.083	
1 06	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRUYA RAMAH ANAK	0	15.581.131.783	595.352.955	0	0	16.176.484.738	0	15.178.815.283	501.815.600	0	0	15.680.630.883	
1 06	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRUYA LANSIA	0	15.344.185.290	1.917.694.221	0	0	17.261.879.511	0	15.096.415.264	1.616.010.625	0	0	16.712.425.889	
1 06	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRUYA HARAPAN DIABEL	0	8.078.419.429	677.855.780	0	0	9.556.275.209	0	7.309.795.719	1.005.091.316	0	0	8.314.687.035	
1 06	UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRUYA WANITA MANDIRI	0	2.515.856.789	581.235.800	0	0	3.097.091.789	0	2.442.812.689	655.079.100	0	0	3.097.891.789	
1 06	UPTD PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	888.825.856	0	0	0	888.825.856	0	918.825.856	0	0	0	918.825.856	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	54.226.890.288	1.770.824.948.676	146.546.538.088	0	0	1.915.571.498.754	43.963.192.408	1.695.728.480.313	131.846.076.333	0	0	1.827.574.566.646	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.792.945.000	142.016.937.219	1.428.917.774	0	0	143.437.854.993	3.947.248.800	135.337.233.165	1.242.474.234	0	0	136.579.707.399	
2 07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.702.945.000	121.251.508.197	546.879.174	0	0	121.798.387.371	3.947.248.800	115.994.361.783	389.782.634	0	0	116.384.144.417	
2 07	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I BOGOR	0	1.316.569.257	0	0	0	1.316.569.257	0	1.364.371.594	0	0	0	1.264.371.594	
2 07	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II KARAWANG	0	2.147.491.312	21.347.000	0	0	2.168.838.312	0	1.876.987.362	0	0	0	1.876.987.362	
2 07	UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH III CREBON	0	1.362.896.240	0	0	0	1.362.896.240	0	1.352.925.022	0	0	0	1.352.925.022	

PROVINSI JAWA BARAT
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 07	2.07.3.32.0.00.01.0004	0	1.185.323.792	0	0	0	0	1.185.323.792	0	1.185.323.792	0	0	0	1.185.323.792
2 07	2.07.3.32.0.00.01.0005	0	783.636.617	0	0	0	0	783.636.617	0	783.636.617	0	0	0	783.636.617
2 07	2.07.3.32.0.00.01.0006	0	4.752.929.295	20.250.000	0	0	0	4.772.579.295	0	4.680.857.995	20.250.000	0	0	4.701.087.995
2 07	2.07.3.32.0.00.01.0007	0	3.479.933.204	832.441.600	0	0	0	4.312.374.804	0	3.394.896.533	832.441.600	0	0	4.227.338.133
2 07	2.07.3.32.0.00.01.0008	0	5.738.055.365	0	0	0	0	5.738.055.365	0	4.811.202.527	0	0	0	4.811.202.527
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	31.975.284.828	463.943.000	0	0	0	32.439.227.828	0	30.503.352.383	211.098.150	0	0	30.714.450.533
2 08	2.08.2.14.0.00.01.0000	0	29.857.698.988	341.093.850	0	0	0	30.198.792.838	0	28.355.351.643	88.249.000	0	0	28.443.600.643
2 08	2.08.2.14.0.00.01.0001	0	2.117.585.840	122.849.150	0	0	0	2.240.434.990	0	2.148.000.740	122.849.150	0	0	2.270.849.890
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.955.706.200	115.170.939.106	3.979.255.558	0	0	0	119.150.194.664	7.373.689.600	116.048.984.304	3.704.207.978	0	0	119.753.192.282
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0002	0	1.105.345.954	39.867.300	0	0	0	1.205.213.254	0	1.128.550.954	32.622.300	0	0	1.161.173.254
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0003	0	1.316.290.175	0	0	0	0	1.316.290.175	0	1.741.359.590	29.330.585	0	0	1.770.690.175
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0004	0	1.874.457.844	307.923.171	0	0	0	2.242.381.015	0	1.757.087.864	379.894.951	0	0	2.136.982.815
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0005	0	1.417.524.578	310.131.400	0	0	0	1.727.655.978	0	1.277.035.698	326.282.400	0	0	1.603.318.098
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0006	0	1.487.284.290	2.029.744.429	0	0	0	3.517.028.719	0	1.458.507.580	2.015.321.641	0	0	3.473.829.221
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0007	0	1.470.321.085	336.745.974	0	0	0	1.807.067.059	0	1.335.136.845	354.900.614	0	0	1.690.117.459
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0008	0	1.579.821.962	0	0	0	0	1.579.821.962	0	1.551.999.962	0	0	0	1.551.999.962
2 09	2.09.0.00.0.00.01.0009	0	1.700.364.073	0	0	0	0	1.700.364.073	0	1.663.846.368	0	0	0	1.663.846.368
2 09	2.09.3.27.0.00.01.0000	6.955.706.200	99.503.631.219	701.302.900	0	0	0	100.205.814.119	7.373.689.600	101.171.741.668	445.498.950	0	0	101.617.240.618
2 09	2.09.3.27.0.00.01.0001	0	2.007.496.813	113.983.847	0	0	0	2.181.480.660	0	2.007.500.347	81.203.937	0	0	2.088.704.284
2 09	2.09.3.27.0.00.01.0010	0	988.401.113	79.476.540	0	0	0	1.067.877.653	0	956.217.428	39.072.600	0	0	995.290.028
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	1.903.221.656	0	0	0	0	1.903.221.656	0	1.422.221.713	0	0	0	1.422.221.713
2 10	1.04.1.03.2.10.01.0000	0	1.903.221.656	0	0	0	0	1.903.221.656	0	1.422.221.713	0	0	0	1.422.221.713
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	39.364.000.000	116.415.783.246	40.635.197.589	0	0	0	157.054.980.835	26.166.500.000	113.193.228.371	34.378.143.502	0	0	147.571.371.873
2 11	2.11.0.00.0.00.03.0000	39.364.000.000	57.366.254.705	247.345.473	0	0	0	57.613.600.178	26.166.500.000	60.254.757.494	511.905.045	0	0	60.766.662.539
2 11	2.11.0.00.0.00.03.0001	0	55.135.623.871	40.012.374.190	0	0	0	95.147.998.067	0	48.640.294.585	32.919.042.159	0	0	81.559.326.744
2 11	2.11.0.00.0.00.03.0002	0	3.913.904.670	379.477.920	0	0	0	4.299.382.590	0	4.298.186.292	947.196.298	0	0	5.245.382.590
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL	0	14.779.878.223	2.389.068.267	0	0	0	17.168.946.490	0	15.380.018.954	1.404.356.085	0	0	16.784.375.039
2 12	2.12.0.00.0.00.01.0000	0	14.779.878.223	2.389.068.267	0	0	0	17.168.946.490	0	15.380.018.954	1.404.356.085	0	0	16.784.375.039
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	108.376.275.845	681.531.680	0	0	0	109.057.807.525	0	104.123.532.771	328.043.800	0	0	104.452.576.571
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000	0	108.376.275.845	681.531.680	0	0	0	109.057.807.525	0	104.123.532.771	329.049.800	0	0	104.452.576.571
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	17.563.376.000	0	0	0	0	17.563.376.000	0	16.077.217.200	0	0	0	16.077.217.200
2 14	2.08.2.14.0.00.01.0000	0	17.563.376.000	0	0	0	0	17.563.376.000	0	16.077.217.200	0	0	0	16.077.217.200
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	506.671.000	195.648.716.870	69.984.077.264	0	0	0	265.652.794.134	5.077.786.000	171.648.151.462	64.852.992.293	0	0	236.501.143.755
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0000	506.671.000	88.789.682.701	12.029.209.821	0	0	0	100.818.892.522	5.077.786.000	81.936.458.127	11.045.973.625	0	0	92.976.431.752
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0001	0	2.384.115.684	6.699.185.833	0	0	0	9.083.299.519	0	2.682.985.783	5.918.949.419	0	0	8.601.935.202
2 15	2.15.0.00.0.00.01.0002	0	3.699.242.280	3.467.212.000	0	0	0	7.166.454.280	0	3.662.392.451	3.460.160.509	0	0	7.142.552.960

PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAL DANAU DAN PENYEBERANGAN													
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH I	0	10.341.609.806	27.580.643.179	0	0	37.902.252.985	0	13.862.920.452	23.685.674.089	0	0	0	37.548.594.541
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH II	0	76.401.989.180	8.166.288.529	0	0	84.568.277.709	0	47.924.983.303	9.137.470.375	0	0	0	57.062.453.678
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH III	0	6.695.717.795	7.086.623.804	0	0	13.782.341.599	0	10.447.513.789	6.888.504.980	0	0	0	17.336.018.769
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0006	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN WILAYAH IV	0	5.714.464.504	4.947.644.896	0	0	10.662.109.400	0	9.555.002.637	4.668.988.096	0	0	0	14.223.990.733
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0007	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN PELABUHAN LAUT	0	1.621.894.920	27.271.200	0	0	1.649.166.120	0	1.581.894.920	27.271.200	0	0	0	1.609.166.120
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	208.276.533.144	16.097.854.870	0	0	224.374.387.214	0	200.900.334.240	14.322.471.964	0	0	0	215.222.806.204
2 16 2.16.0.00.0.00.01.0001	UPTD PUSAT LAYANAN DIGITAL DATA DAN INFRASTRUKTUR GEOSPASIAL	0	32.639.977.057	854.691.446	0	0	33.494.668.503	0	32.182.719.969	884.754.975	0	0	0	33.067.474.944
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	175.636.556.087	15.248.162.624	0	0	190.879.718.711	0	168.717.614.271	13.487.716.989	0	0	0	182.155.331.260
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL, DAN MENENGAH	636.500.000	92.869.145.139	1.288.051.310	0	0	94.157.196.449	337.700.000	78.424.019.246	3.235.555.958	0	0	0	81.659.575.204
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	636.500.000	59.401.369.919	753.087.430	0	0	60.154.457.349	337.700.000	55.837.187.404	2.062.369.735	0	0	0	57.899.557.139
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0001	UPTD BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN KEWIRUSAHAAN	0	33.407.775.220	534.963.880	0	0	34.002.739.100	0	22.586.831.842	1.173.186.223	0	0	0	23.760.018.065
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	58.234.000.671	2.977.797.784	0	0	62.211.798.455	0	55.206.440.221	2.972.673.855	0	0	0	58.179.114.876
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	59.234.000.671	2.977.797.784	0	0	62.211.798.455	0	55.206.440.221	2.972.673.855	0	0	0	58.179.114.076
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAJARAN DAN OLAH RAGA	960.100.000	568.966.571.210	1.858.138.942	0	0	570.824.710.152	960.100.000	563.697.147.977	1.355.596.072	0	0	0	565.052.744.649
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	960.100.000	568.966.571.210	1.858.138.942	0	0	570.824.710.152	960.100.000	563.697.147.977	1.355.596.072	0	0	0	565.052.744.049
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	2.311.032.700	100.000.000	0	0	2.411.032.700	0	1.994.033.169	100.000.000	0	0	0	2.094.033.169
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	2.311.032.700	100.000.000	0	0	2.411.032.700	0	1.994.033.169	100.000.000	0	0	0	2.094.033.169
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENSANDIAAN	0	3.032.582.473	0	0	0	3.032.582.473	0	2.863.975.473	0	0	0	0	2.863.975.473
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	3.032.582.473	0	0	0	3.032.582.473	0	2.863.975.473	0	0	0	0	2.863.975.473
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	39.922.359.979	616.000.000	0	0	40.538.359.979	0	40.546.971.735	834.300.000	0	0	0	41.381.271.735
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0	5.723.000.000	0	0	0	5.723.000.000	0	6.437.469.233	0	0	0	0	6.437.469.233
2 22 3.26.2.22.0.00.01.0001	UPTD PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT	0	34.199.359.979	616.000.000	0	0	34.815.359.979	0	34.109.502.502	834.300.000	0	0	0	34.943.802.502
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	100.168.000	50.393.678.216	3.050.724.842	0	0	53.444.403.058	100.168.000	47.527.494.272	2.903.162.442	0	0	0	50.430.656.714
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.168.000	50.393.678.216	3.050.724.842	0	0	53.444.403.058	100.168.000	47.527.494.272	2.903.162.442	0	0	0	50.430.656.714
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	1.168.624.151	0	0	0	1.168.624.151	0	834.133.657	0	0	0	0	834.133.657
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1.168.624.151	0	0	0	1.168.624.151	0	834.133.657	0	0	0	0	834.133.657
3	URUSAN PEMERINTAHAN PRIBADI	13.246.448.503	1.142.485.507.698	79.449.680.164	0	0	1.221.935.187.862	15.144.978.668	1.115.293.168.755	76.141.085.538	0	0	0	1.191.434.246.293
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	635.403.209	103.295.270.854	21.888.758.373	0	0	125.184.028.427	752.154.428	101.126.493.659	28.524.279.772	0	0	0	121.650.773.431
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0001	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN	0	7.932.408.914	4.856.944.200	0	0	12.789.345.114	0	7.850.237.614	4.558.935.050	0	0	0	12.409.172.664
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0002	CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA	0	4.380.134.896	3.472.349.656	0	0	7.852.483.692	0	4.166.402.836	3.217.349.656	0	0	0	7.383.752.492
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD PELABUHAN PERIKANAN CILAU/TEREUN	0	4.401.261.398	2.525.535.344	0	0	6.926.796.742	0	4.221.108.898	1.944.355.344	0	0	0	6.165.464.242
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD PELABUHAN PERIKANAN MELARA/CIKEM	0	4.482.872.197	241.470.400	0	0	4.674.342.597	0	4.432.872.197	241.470.400	0	0	0	4.674.342.597
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH SELATAN	0	2.199.894.518	1.700.000.000	0	0	3.899.894.518	0	2.190.894.518	1.609.277.729	0	0	0	3.800.162.247
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH UTARA	0	1.932.887.056	142.727.344	0	0	2.075.614.400	0	1.932.887.056	142.727.344	0	0	0	2.075.614.400
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0007	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU PRODUK PERIKANAN	0	1.924.530.225	1.404.467.091	0	0	3.328.997.316	0	2.167.583.455	1.161.403.861	0	0	0	3.328.997.316
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0008	UPTD PERIKANAN AIR PAHAI DAN LALU WILAYAH SELATAN	0	3.806.208.185	2.018.564.308	0	0	5.824.772.493	0	3.806.208.185	2.018.564.308	0	0	0	5.824.772.493
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0009	UPTD PERIKANAN AIR PAHAI DAN LALU WILAYAH UTARA	0	3.383.701.676	89.667.030	0	0	3.473.368.706	0	3.383.701.676	89.667.030	0	0	0	3.473.368.706
3 25 3.25.3.25.3.25.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	635.403.209	58.902.889.909	5.437.033.000	0	0	74.339.422.909	752.154.428	66.966.597.284	5.480.529.050	0	0	0	72.447.126.334
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.078.934.000	82.906.241.200	1.550.358.219	0	0	84.456.599.419	1.099.634.000	76.412.064.601	1.323.839.324	0	0	0	77.735.903.925
3 26 3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.078.934.000	82.906.241.200	1.550.358.219	0	0	84.456.599.419	1.099.634.000	76.412.064.601	1.323.839.324	0	0	0	77.735.903.925

PROVINSI JAWA BARAT
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3.26.2.22.0.00.01.0001	UPTD PENGELOLAAN KEBUDAIRYAN DAERAH JAWA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.049.033.303	448.562.736.696	30.708.563.953	0	0	479.263.300.649	3.211.654.240	441.814.448.619	29.179.838.864	0	0	0	470.994.287.483
3.27	UPTD BALAI PELATIHAN PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN CIKOLE LEMBANG	0	1.444.399.636	35.000.000	0	0	1.479.399.636	0	1.202.439.636	0	0	0	0	1.202.439.636
3.27	UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN KAMBING MARGAWATI	0	5.228.187.329	47.754.706	0	0	5.275.942.035	0	5.165.919.549	35.994.706	0	0	0	5.201.914.255
3.27	UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK UNGGAS JATIWANGI	0	5.627.144.151	43.935.000	0	0	5.671.079.151	0	5.565.689.401	35.350.000	0	0	0	5.601.039.401
3.27	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TERNAK SAPI PERAH DAN HUIJAN PAKAN TERNAK CIKOLE LEMBANG	0	6.330.777.514	2.583.988.527	0	0	8.914.766.041	0	6.191.174.204	2.284.691.723	0	0	0	8.475.865.927
3.27	UPTD BALAI PENGUJIAN MUTU DAN KEAMPUAN PAKAN/BAHAN PAKAN CIKOLE LEMBANG	0	1.250.258.392	87.938.351	0	0	1.338.196.743	0	1.184.438.022	124.008.321	0	0	0	1.308.446.343
3.27	UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUAHAN TERNAK SAPI PERAH BUNIKASIH	0	6.770.834.455	7.683.163.655	0	0	14.453.998.110	0	6.508.656.527	6.841.397.860	0	0	0	13.410.054.387
3.27	UPTD BALAI PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN INSEMINASI BUAHAN TERNAK SAPI POTONG CIAMIS	0	3.583.622.065	550.000.000	0	0	4.133.622.065	0	3.399.012.652	598.339.668	0	0	0	3.991.352.320
3.27	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	0	11.344.630.306	0	0	0	11.344.630.306	0	10.470.279.894	0	0	0	0	10.470.279.894
3.27	UPTD BALAI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	1.661.186.374	0	0	0	1.661.186.374	0	1.551.725.611	25.000.530	0	0	0	1.576.726.141
3.27	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN	0	1.610.073.660	1.590.077.237	0	0	3.200.150.897	0	1.547.458.345	1.589.734.537	0	0	0	3.137.193.882
3.27	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.829.600.000	242.910.196.425	1.826.315.534	0	0	244.736.511.959	3.017.220.937	285.429.762.913	1.845.939.504	0	0	0	287.275.702.417
3.27	UPTD BALAI BENIH HORTIKULTURA	0	6.936.690.307	1.275.294.500	0	0	7.611.984.807	0	6.311.283.807	1.298.332.000	0	0	0	7.609.615.807
3.27	UPTD BALAI BENIH KENTANG	0	2.894.132.804	298.779.840	0	0	3.192.912.644	0	2.894.132.804	298.779.840	0	0	0	3.192.912.644
3.27	UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIA	0	3.460.411.524	3.200.941.670	0	0	6.661.353.194	0	3.460.411.524	3.137.171.041	0	0	0	6.597.582.565
3.27	UPTD BALAI PELATIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0	3.804.025.284	106.704.000	0	0	3.910.729.284	0	3.778.153.284	126.504.000	0	0	0	3.904.657.284
3.27	UPTD BALAI PENGAHASIAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0	6.547.525.360	7.569.562.500	0	0	14.117.087.860	0	6.588.781.126	7.421.670.549	0	0	0	14.010.451.675
3.27	UPTD BALAI PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN	0	6.645.970.767	214.670.500	0	0	6.860.641.267	0	7.640.455.422	220.195.845	0	0	0	7.860.649.267
3.27	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0	30.020.085.180	1.382.102.000	0	0	31.402.187.180	0	34.036.835.180	1.382.102.000	0	0	0	35.418.937.180
3.27	Dinas Perkebunan	219.433.303	81.170.218.689	999.558.180	0	0	82.160.776.869	194.433.303	80.040.565.640	1.299.541.820	0	0	0	81.340.107.460
3.27	UPTD BALAI PENGEMBANGAN DAN PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN	0	9.204.452.519	215.938.280	0	0	9.420.390.799	0	8.724.002.202	206.939.280	0	0	0	8.930.941.482
3.27	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	0	4.358.028.004	656.831.440	0	0	5.014.859.444	0	4.117.826.004	166.903.040	0	0	0	4.284.729.044
3.27	UPTD BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	0	6.359.885.951	338.083.833	0	0	6.697.969.784	0	5.951.463.812	241.184.600	0	0	0	6.192.648.412
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	6.166.550.000	234.047.076.839	8.546.994.544	0	0	242.594.071.383	6.164.750.000	236.806.891.897	8.574.313.150	0	0	0	245.381.305.047
3.28	Dinas Kehutanan	6.166.550.000	192.887.177.320	511.712.250	0	0	193.398.889.570	6.164.750.000	192.899.551.493	929.694.208	0	0	0	193.829.245.701
3.28	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I	0	4.510.750.657	282.358.225	0	0	4.793.114.882	0	4.464.029.620	207.418.005	0	0	0	4.671.447.625
3.28	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH II	0	4.002.422.407	1.864.759.934	0	0	5.867.182.341	0	3.981.894.674	1.792.922.334	0	0	0	5.774.817.008
3.28	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH III	0	2.553.860.910	478.253.430	0	0	3.032.114.340	0	2.553.860.910	358.100.330	0	0	0	2.911.961.240
3.28	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IV	0	3.335.831.385	497.301.000	0	0	3.833.132.385	0	3.145.037.484	585.931.400	0	0	0	3.730.968.884
3.28	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH V	0	2.726.095.622	392.736.270	0	0	3.118.831.892	0	2.613.229.122	383.981.270	0	0	0	2.997.210.392
3.28	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VI	0	3.086.868.576	149.757.900	0	0	3.235.626.476	0	2.961.901.916	149.757.900	0	0	0	3.111.659.816
3.28	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VII	0	3.197.883.526	204.736.000	0	0	3.402.619.526	0	3.076.094.486	204.736.000	0	0	0	3.280.830.486
3.28	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH VIII	0	3.680.236.410	871.558.497	0	0	4.051.794.907	0	3.601.025.135	326.070.577	0	0	0	3.927.095.712
3.28	CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH IX	0	3.141.152.140	403.561.200	0	0	3.544.713.340	0	3.064.740.760	294.400.000	0	0	0	3.359.140.760
3.28	UPTD PELAYANAN PENGOLOHAN HASIL HUTAN	0	2.045.763.878	16.939.859	0	0	2.062.703.737	0	2.037.137.868	0	0	0	0	2.037.137.868
3.28	UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	0	2.508.056.440	223.919.979	0	0	2.732.976.419	0	2.518.605.299	101.091.119	0	0	0	2.619.696.418
3.28	UPTD TAMAN HUTAN RAYA RSH DILIANDA	0	6.370.971.568	3.150.000.000	0	0	9.520.971.568	0	9.889.883.130	3.240.210.007	0	0	0	13.130.093.137
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.200.000.000	120.693.138.254	10.821.372.629	0	0	131.514.510.883	1.300.000.000	113.768.690.455	10.290.133.113	0	0	0	124.058.823.568
3.29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.200.000.000	91.002.874.123	4.180.561.560	0	0	95.183.435.683	1.300.000.000	84.470.079.419	3.527.127.116	0	0	0	87.997.206.535
3.29	CABANG DINAS ENERGI DAN	0	6.618.440.924	588.124.300	0	0	7.206.565.224	0	6.654.407.404	657.566.080	0	0	0	7.311.974.084

PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANSASI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
3 29 3.29.0.00.0.00.01.0002	SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I CIANJUR														
3 29 3.29.0.00.0.00.01.0003	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II BOGOR	0	3.504.490.416	1.196.036.100	0	0	4.700.526.516	0	3.675.793.840	1.054.111.876	0	0	0	4.729.905.716	
3 29 3.29.0.00.0.00.01.0004	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III PURWAKARTA	0	3.014.906.568	1.013.632.600	0	0	4.028.539.248	0	2.901.656.238	1.061.620.260	0	0	0	3.963.276.498	
3 29 3.29.0.00.0.00.01.0004	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV BANDUNG	0	6.247.818.508	919.382.070	0	0	7.167.200.578	0	5.915.511.638	1.136.633.080	0	0	0	7.052.144.718	
3 29 3.29.0.00.0.00.01.0005	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V SUMEDANG	0	3.361.409.982	733.436.108	0	0	4.094.846.090	0	3.198.194.158	842.636.400	0	0	0	4.041.830.638	
3 29 3.29.0.00.0.00.01.0006	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VI TASIKMALAYA	0	2.273.296.527	1.027.796.853	0	0	3.301.093.380	0	2.340.060.350	918.522.221	0	0	0	3.258.582.571	
3 29 3.29.0.00.0.00.01.0007	CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH VII CIREBON	0	2.349.602.742	1.023.915.608	0	0	3.373.518.350	0	2.311.808.230	955.525.950	0	0	0	3.267.334.180	
3 29 3.29.0.00.0.00.01.0008	UPTD LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	2.320.298.464	138.487.350	0	0	2.458.785.814	0	2.300.179.178	136.389.450	0	0	0	2.436.568.628	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	46.407.877.106	1.982.575.835	0	0	48.310.552.141	0	43.248.683.243	1.441.403.058	0	0	0	44.690.086.301	
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0	39.524.152.018	0	0	0	39.524.152.018	0	36.433.606.178	0	0	0	0	36.433.606.178	
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0001	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AGRI BANDUNG	0	1.605.318.325	341.024.783	0	0	1.946.343.108	0	1.761.072.696	85.270.412	0	0	0	1.846.343.108	
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0002	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AIR MINUM DALAM KEMASAN CIREBON	0	1.703.054.757	400.770.471	0	0	2.106.825.228	0	1.666.054.157	344.970.771	0	0	0	2.011.024.928	
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0003	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR	0	1.571.122.637	696.320.524	0	0	2.267.443.161	0	1.543.684.811	623.758.350	0	0	0	2.167.443.161	
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0004	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG LOGAM DAN ELEKTRONIKA KARAWANG	0	1.941.529.669	464.459.257	0	0	2.405.988.926	0	1.843.585.401	387.403.525	0	0	0	2.230.988.926	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.116.528.000	106.069.893.349	4.839.857.411	0	0	116.108.950.760	2.616.778.000	101.972.288.481	4.807.278.257	0	0	0	106.779.566.738	
3 31 3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.116.528.000	91.043.672.869	3.038.800.154	0	0	94.082.473.023	2.616.778.000	87.637.331.778	3.650.757.223	0	0	0	91.288.089.021	
3 31 3.31.3.30.0.00.01.0001	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AGRI BANDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 31 3.31.3.30.0.00.01.0002	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG AIR MINUM DALAM KEMASAN CIREBON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 31 3.31.3.30.0.00.01.0003	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KERAMIK DAN TABUNG GAS BOGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 31 3.31.3.30.0.00.01.0004	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG LOGAM DAN ELEKTRONIKA KARAWANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 31 3.31.3.30.0.00.01.0005	UPTD INDUSTRI LOGAM	0	3.854.056.256	207.637.657	0	0	4.061.693.913	0	3.860.262.856	141.431.057	0	0	0	4.001.693.913	
3 31 3.31.3.30.0.00.01.0006	UPTD INDUSTRI PANGAN, OLAHAN DAN KEMASAN	0	11.172.164.224	792.619.600	0	0	11.964.783.824	0	10.474.693.847	1.015.089.977	0	0	0	11.489.783.824	
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	503.174.200	0	0	0	503.174.200	0	143.579.800	0	0	0	0	143.579.800	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	503.174.200	0	0	0	503.174.200	0	143.579.800	0	0	0	0	143.579.800	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1.727.380.000	1.979.104.154.895	99.723.930.832	0	0	2.078.828.085.727	1.345.808.000	1.799.416.628.329	143.624.663.677	0	0	0	1.943.041.292.006	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	1.727.380.000	1.358.646.417.997	38.695.820.101	0	0	1.389.336.238.098	1.345.808.000	1.257.791.614.790	35.887.655.112	0	0	0	1.293.679.269.902	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001	Biro Pemerintahan dan Organisasi Daerah	0	27.169.788.104	0	0	0	27.169.788.104	0	20.819.715.170	0	0	0	0	20.819.715.170	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	0	8.489.822.810	0	0	0	8.489.822.810	0	6.519.995.964	0	0	0	0	6.519.995.964	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0003	Biro Kesejahteraan Rakyat	1.161.500.000	857.111.748.487	0	0	0	857.111.748.487	780.000.000	800.584.031.635	1.275.667.500	0	0	0	801.859.699.135	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan	0	9.347.283.223	0	0	0	9.347.283.223	0	7.728.943.644	0	0	0	0	7.728.943.644	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005	Biro Perencanaan	0	12.921.400.482	0	0	0	12.921.400.482	0	10.461.906.707	107.279.000	0	0	0	10.569.185.707	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0006	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0	8.530.135.929	1.969.360.350	0	0	10.499.496.279	0	6.951.761.979	1.726.939.700	0	0	0	8.678.701.679	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0007	Biro Organisasi	0	5.189.814.545	0	0	0	5.189.814.545	0	3.704.320.851	0	0	0	0	3.704.320.851	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008	Biro Administrasi Pimpinan	0	50.385.424.934	0	0	0	50.385.424.934	0	39.531.491.544	0	0	0	0	39.531.491.544	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009	Biro Umum	565.800.000	379.494.999.483	28.726.459.751	0	0	408.221.459.234	565.800.000	361.469.447.236	32.777.768.912	0	0	0	394.247.216.148	
4 02	SEKRETARIAT DPRD	0	620.463.736.898	68.028.110.731	0	0	688.491.847.629	0	541.625.813.539	107.737.008.565	0	0	0	649.362.822.104	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	620.463.736.898	68.028.110.731	0	0	688.491.847.629	0	541.625.813.539	107.737.008.565	0	0	0	649.362.822.104	
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	35.180.980.851.646	903.986.165.099	60.876.962.973	321.817.184.573	13.641.805.120.545	14.928.485.433.190	35.438.936.678.177	872.134.214.269	68.245.839.582	370.836.999.221	13.735.653.788.898	15.038.870.841.970		
5 01	PERENCANAAN	12.000.000	81.673.152.797	1.588.649.000	0	0	83.261.801.797	12.000.000	77.986.836.296	2.395.138.179	0	0	0	80.381.974.385	
5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.000.000	81.673.152.797	1.588.649.000	0	0	83.261.801.797	12.000.000	77.986.836.296	2.395.138.179	0	0	0	80.381.974.385	
5 02	KEUANGAN	35.174.026.271.646	640.815.058.138	58.356.769.808	321.817.184.573	13.641.805.120.545	14.656.792.973.148	35.432.600.904.177	617.552.823.636	58.605.138.133	370.836.999.221	13.735.653.788.898	14.774.652.749.888		
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	88.072.367.974	3.626.681.500	321.817.184.573	13.641.805.120.545	14.055.321.354.532	0	69.967.312.536	2.135.684.060	370.836.999.221	13.735.653.788.898	14.178.593.784.715		
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengamanan dan Pemeliharaan	0	62.699.348.264	4.664.528.085	0	0	67.363.876.349	0	60.946.621.565	941.108.330	0	0	0	61.887.729.835	

PROVINSI JAWA BARAT
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	aset													
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	35.174.826.271.646	361.741.783.674	10.595.003.971	0	0	390.336.867.645	35.432.608.984.177	360.015.311.321	10.771.407.470	0	0	378.786.718.795	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	0	3.751.889.206	790.696.578	0	0	4.482.555.776	0	3.800.226.269	766.896.809	0	0	4.507.037.078	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0002	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN GARUT	0	3.293.394.933	655.453.895	0	0	3.948.848.828	0	3.149.487.071	775.465.017	0	0	3.924.952.088	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0003	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BOGOR	0	7.140.427.620	1.292.489.300	0	0	8.432.896.920	0	7.372.769.920	1.336.044.000	0	0	8.708.813.920	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0004	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIANJUR	0	2.875.341.885	4.885.880.400	0	0	7.761.222.285	0	2.845.475.685	5.736.650.332	0	0	8.582.126.017	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0005	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI II PELABUHAN RAIU	0	3.462.042.667	82.017.164	0	0	3.544.059.831	0	3.444.170.414	98.177.164	0	0	3.542.347.578	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0006	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON II CILEDUG	0	3.014.882.425	311.719.000	0	0	3.326.601.425	0	2.877.727.425	297.019.000	0	0	3.174.746.425	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0007	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIAMIS	0	3.706.510.260	450.794.133	0	0	4.237.312.393	0	3.529.002.967	710.284.486	0	0	4.239.287.473	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0008	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PANGANDARAN	0	2.898.915.209	74.932.870	0	0	2.973.848.079	0	2.932.659.749	73.498.340	0	0	3.006.068.089	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0009	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BEKASI	0	4.637.831.835	3.133.405.900	0	0	7.770.437.735	0	4.652.205.032	3.841.547.650	0	0	8.493.752.682	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0010	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG III SOEKARNO HATTA	0	3.459.677.866	585.954.516	0	0	4.099.682.322	0	3.440.260.489	586.161.891	0	0	4.026.422.374	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0011	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG I RANCAKEK	0	3.673.309.265	1.453.574.000	0	0	5.126.883.265	0	3.657.702.703	1.466.541.500	0	0	5.124.244.203	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0012	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN	0	3.495.891.150	229.210.000	0	0	3.725.101.150	0	3.498.720.496	228.749.895	0	0	3.727.469.591	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0013	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIMAHI	0	2.695.499.713	1.070.892.876	0	0	3.766.392.589	0	2.726.756.717	788.605.844	0	0	3.515.362.561	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0014	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA CIREBON	0	2.775.891.543	625.582.321	0	0	3.401.473.864	0	2.810.469.214	615.581.321	0	0	3.426.044.535	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0015	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG II SCOREANG	0	3.735.444.138	312.326.000	0	0	4.048.370.138	0	3.597.154.280	459.098.500	0	0	4.056.252.780	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0016	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA	0	2.826.533.293	699.401.962	0	0	3.525.935.255	0	2.639.246.901	860.476.796	0	0	3.499.723.697	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0017	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU II HAURGEULIS	0	3.084.641.380	184.346.898	0	0	3.268.988.270	0	3.063.051.078	221.746.890	0	0	3.284.797.968	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0018	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN CIREBON I SLIMBER	0	4.208.561.666	133.724.020	0	0	4.342.285.686	0	4.125.931.102	212.638.330	0	0	4.338.569.432	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0019	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA TASIKMALAYA	0	2.310.568.270	417.040.000	0	0	2.735.608.270	0	2.284.752.843	436.919.640	0	0	2.721.672.483	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0020	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA	0	3.512.825.426	1.106.306.410	0	0	4.619.131.836	0	3.512.825.426	1.106.306.410	0	0	4.619.131.836	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0021	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BOGOR	0	4.822.219.724	1.724.879.445	0	0	6.547.099.169	0	4.732.857.604	1.526.821.477	0	0	6.659.679.081	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0022	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KARAWANG	0	5.933.675.948	110.221.400	0	0	6.043.897.348	0	5.709.496.248	296.167.824	0	0	6.005.664.072	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0023	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN INDRAMAYU I	0	3.500.676.312	346.612.470	0	0	3.847.288.782	0	3.495.231.581	345.792.470	0	0	3.841.024.051	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0024	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG	0	3.736.324.333	331.417.400	0	0	4.067.741.733	0	3.552.680.533	412.716.200	0	0	3.965.396.733	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0026	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANJAR	0	2.430.830.748	182.171.450	0	0	2.613.002.198	0	2.509.688.923	182.116.170	0	0	2.691.805.093	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0027	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN	0	3.770.052.824	59.835.600	0	0	3.829.888.424	0	3.638.510.384	125.227.600	0	0	3.763.737.984	

PROVINSI JAWA BARAT
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK II CENERE													
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0028	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG I PAJAJARAN	0	4.635.927.898	1.055.845.305	0	0	5.691.773.204	0	4.559.695.673	1.167.808.010	0	0	5.727.503.683	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0029	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BIKASARI	0	6.354.263.863	795.688.641	0	0	7.149.952.504	0	5.999.415.963	1.094.481.807	0	0	7.093.897.770	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0030	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA DEPOK I	0	5.019.737.187	353.477.200	0	0	5.373.214.387	0	4.929.981.682	432.102.280	0	0	5.362.083.962	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0031	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUBANG	0	3.319.764.866	481.506.000	0	0	3.801.270.866	0	3.270.756.902	494.366.592	0	0	3.765.123.494	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0032	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BANDUNG II KAWALLIYAN	0	4.514.871.563	739.651.400	0	0	5.254.522.963	0	4.580.164.633	831.759.580	0	0	5.391.924.213	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0033	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI	0	2.543.754.608	30.068.798	0	0	2.573.823.406	0	2.588.613.406	40.690.036	0	0	2.629.303.406	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0034	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA	0	3.454.372.338	493.400.000	0	0	3.947.772.338	0	3.559.180.053	567.692.900	0	0	4.066.872.953	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0035	UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	0	3.642.758.207	309.428.500	0	0	3.952.186.707	0	3.556.712.582	344.964.242	0	0	3.901.676.824	
5 03	KEPEGAWAIAN	3.000.000	75.470.385.209	5.943.115.153	0	0	81.413.500.362	3.000.000	76.798.723.574	6.362.367.361	0	0	83.161.090.935	
5 03 5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	3.000.000	75.470.385.209	5.943.115.153	0	0	81.413.500.362	3.000.000	76.798.723.574	6.362.367.361	0	0	83.161.090.935	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.059.580.000	67.557.902.632	675.090.311	0	0	68.232.992.963	6.312.694.000	62.732.204.868	612.058.740	0	0	63.344.263.608	
5 04 5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.059.580.000	67.557.902.632	675.090.311	0	0	68.232.992.963	6.312.694.000	62.732.204.868	612.058.740	0	0	63.344.263.608	
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	25.355.081.581	172.778.617	0	0	25.527.860.198	0	24.313.352.970	187.017.169	0	0	24.500.370.139	
5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	25.355.081.581	172.778.617	0	0	25.527.860.198	0	24.313.352.970	187.017.169	0	0	24.500.370.139	
5 07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	0	13.115.684.728	140.670.000	0	0	13.256.304.728	0	12.750.273.015	80.120.000	0	0	12.830.393.015	
5 07 5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	0	13.115.684.728	140.670.000	0	0	13.256.304.728	0	12.750.273.015	80.120.000	0	0	12.830.393.015	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	111.437.016.141	9.414.128.026	0	0	120.851.144.167	0	115.219.320.170	5.804.343.790	0	0	121.023.663.960	
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	0	111.437.016.141	9.414.128.026	0	0	120.851.144.167	0	115.219.320.170	5.804.343.790	0	0	121.023.663.960	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektoral	0	111.437.016.141	9.414.128.026	0	0	120.851.144.167	0	115.219.320.170	5.804.343.790	0	0	121.023.663.960	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	1.428.831.592.699	1.445.840.445	0	0	1.430.277.433.144	0	1.487.632.457.432	1.514.970.445	0	0	1.489.147.427.877	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	1.428.831.592.699	1.445.840.445	0	0	1.430.277.433.144	0	1.487.632.457.432	1.514.970.445	0	0	1.489.147.427.877	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1.428.831.592.699	1.445.840.445	0	0	1.430.277.433.144	0	1.487.632.457.432	1.514.970.445	0	0	1.489.147.427.877	
TOTAL		35.918.695.827.078	26.670.609.950.393	2.150.927.820.229	321.817.184.571	13.641.885.128.545	36.785.159.275.740	36.287.291.775.301	28.612.488.767.549	2.186.205.163.610	370.836.309.221	13.735.653.788.898	36.965.184.661.250	

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	1.09	00	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	80.380.000	91.095.000	10.715.000	
Jumlah Belanja											1.430.277.433.144	1.489.147.427.877	58.869.994.733	
Total Surplus/(Defisit)											(1.430.277.433.144)	(1.489.147.427.877)	(58.869.994.733)	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0	

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 1.01 00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	500.000.000	0	0	0	500.000.000	209.779.998	0	0	0	209.779.998	(290.220.002)
TOTAL		20.678.609.950.393	2.150.927.020.229	321.817.184.573	13.641.805.120.545	36.785.159.275.740	20.612.488.767.501	2.186.205.105.638	370.838.999.221	12.735.652.785.006	36.905.184.661.250	120.025.385.510

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01	PELAYANAN UMUM											
01 01 1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5.313.297.650.161	23.685.973.927	0	0	5.336.983.624.088	5.260.886.178.498	15.156.012.322	0	0	5.276.042.190.820	(60.941.433.268)
01 02 1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.345.351.564.973	35.918.719.645	0	0	1.381.270.284.618	1.610.752.561.194	87.809.302.090	0	0	1.698.561.863.224	317.291.578.606
01 03 1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	226.825.672.178	21.424.799.885	0	0	248.250.472.063	232.235.980.908	32.478.511.158	0	0	264.714.492.126	16.464.020.063
01 04 1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	56.443.313.471	3.668.882.810	0	0	60.112.196.281	58.507.522.276	3.465.794.779	0	0	61.973.317.055	1.861.120.774
01 05 1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52.555.774.860	683.474.665	0	0	53.239.249.525	49.767.365.866	864.406.426	0	0	50.631.772.292	(2.607.477.233)
01 06 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	120.518.863.260	13.750.934.841	0	0	134.269.798.101	117.663.165.371	14.731.392.818	0	0	132.394.558.189	(1.875.239.912)
01 07 2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	124.534.456.011	1.420.917.774	0	0	125.955.373.785	120.289.438.823	1.242.474.234	0	0	121.531.913.057	(4.423.460.728)
01 08 2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	26.167.837.150	463.943.000	0	0	26.631.780.150	25.377.280.805	211.098.150	0	0	25.588.378.955	(1.043.401.195)
01 09 2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	92.208.894.266	3.979.255.558	0	0	96.188.149.824	95.069.598.580	3.704.207.978	0	0	98.773.806.558	2.585.656.734
01 10 2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	59.501.095.996	626.823.393	0	0	60.127.919.389	62.112.716.178	1.459.101.343	0	0	63.571.817.521	3.443.898.132
01 11 2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.779.878.223	2.389.068.267	0	0	17.168.946.490	15.380.018.954	1.404.356.085	0	0	16.784.375.039	(384.571.451)
01 12 2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	108.376.275.845	681.531.680	0	0	109.057.807.525	104.123.532.771	329.043.800	0	0	104.452.576.571	(4.605.230.954)
01 13 2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	94.534.244.842	18.050.913.788	0	0	112.585.158.630	93.820.080.883	16.121.203.088	0	0	109.941.283.971	(2.643.874.659)
01 14 2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50.250.466.267	16.097.854.070	0	0	66.348.320.337	47.454.960.192	14.322.471.964	0	0	61.777.432.156	(4.570.888.181)
01 15 2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	36.594.572.251	1.288.051.310	0	0	37.882.623.561	38.661.992.687	3.235.555.958	0	0	41.897.548.645	4.014.925.084
01 16 2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	47.653.491.471	2.977.797.784	0	0	50.631.289.255	45.350.777.931	2.972.673.855	0	0	48.323.451.786	(2.307.837.469)
01 17 2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	43.871.363.874	1.797.420.742	0	0	45.668.784.616	43.642.415.078	959.414.282	0	0	44.601.829.360	(1.066.955.256)
01 18 2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.311.032.700	100.000.000	0	0	2.411.032.700	1.994.033.169	100.000.000	0	0	2.094.033.169	(316.999.531)
01 19 2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	22.059.168.307	616.000.000	0	0	22.685.168.307	22.769.078.523	834.300.000	0	0	23.603.378.523	918.210.216
01 20 2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	48.998.336.716	2.398.178.042	0	0	51.396.514.758	46.427.125.149	2.279.572.042	0	0	48.706.697.191	(2.689.817.567)
01 21 2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.168.624.151	0	0	0	1.168.624.151	834.133.657	0	0	834.133.657	(334.490.494)	
01 22 3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	72.269.115.284	7.296.178.340	0	0	79.565.293.624	72.302.150.023	6.279.428.539	0	0	78.581.578.562	(983.715.062)
01 23 3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	51.904.914.703	1.451.638.219	0	0	53.356.552.922	52.161.063.229	1.323.839.324	0	0	53.484.902.553	128.349.631
01 24 3 27	URUSAN PEMERINTAHAN	232.175.144.259	4.771.886.697	0	0	236.947.030.956	235.954.341.981	4.511.602.474	0	0	240.465.944.455	3.518.913.499

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
	BIDANG PERTANIAN											
01 25 3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	211.271.318.193	8.542.141.944	0	0	219.813.460.137	214.865.745.563	8.569.460.550	0	0	223.435.206.113	3.621.745.976
01 26 3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	86.259.913.728	3.873.436.846	0	0	90.133.350.574	85.233.138.511	5.425.432.535	0	0	90.658.571.046	525.220.472
01 27 3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.727.994.998	1.334.564.504	0	0	7.062.559.502	5.868.669.725	1.090.297.633	0	0	6.958.967.358	(103.592.144)
01 28 3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	90.888.247.806	2.946.807.411	0	0	93.835.055.217	88.744.139.266	3.698.433.313	0	0	92.442.572.579	(1.392.482.638)
01 29 4 01	SEKRETARIAT DAERAH	1.352.479.007.059	30.695.820.101	0	0	1.383.174.827.160	1.253.134.700.298	35.887.655.112	0	0	1.289.022.355.410	(94.152.471.750)
01 30 4 02	SEKRETARIAT DPRD	620.463.736.898	69.028.110.731	0	0	689.491.847.629	541.625.013.539	107.737.008.565	0	0	649.362.022.104	(40.129.825.525)
01 31 5 01	PERENCANAAN	81.673.152.797	1.588.649.000	0	0	83.261.801.797	77.986.836.206	2.395.138.179	0	0	80.381.974.385	(2.879.827.412)
01 32 5 02	KEUANGAN	640.813.958.132	52.356.709.892	321.817.184.573	13.641.805.120.545	14.656.792.973.142	617.552.823.636	50.609.138.133	370.836.999.221	13.735.653.788.898	14.774.652.749.888	117.859.776.746
01 33 5 03	KEPEGAWAIAN	75.470.385.209	5.943.115.153	0	0	81.413.500.362	76.798.723.574	6.362.367.361	0	0	83.161.090.935	1.747.590.573
01 34 5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	67.557.902.652	675.090.311	0	0	68.232.992.963	62.732.204.858	612.058.740	0	0	63.344.263.608	(4.888.729.355)
01 35 5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	25.355.081.581	172.778.617	0	0	25.527.860.198	24.313.352.970	187.017.169	0	0	24.500.370.139	(1.027.490.059)
01 36 5 07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	13.115.684.728	140.620.000	0	0	13.256.304.728	12.750.273.015	80.120.000	0	0	12.830.393.015	(425.911.713)
01 37 6 01	INSPEKTORAT DAERAH	111.437.016.141	9.414.128.026	0	0	120.851.144.167	115.219.320.170	5.804.343.790	0	0	121.023.663.960	172.519.793
01 38 8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.428.831.592.699	1.445.840.445	0	0	1.430.277.433.144	1.487.632.457.432	1.514.970.445	0	0	1.489.147.427.877	58.869.994.733
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN											
03 01 1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAPAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30.895.579.578	2.971.134.000	0	0	33.866.713.578	26.738.473.711	0	0	0	26.738.473.711	(7.128.239.867)
03 02 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.227.931.337	60.500.000	0	0	6.288.431.337	5.867.392.195	0	0	0	5.867.392.195	(421.039.142)
03 03 4 01	SEKRETARIAT DAERAH	6.161.410.938	0	0	0	6.161.410.938	4.656.914.492	0	0	0	4.656.914.492	(1.504.496.446)
04	EKONOMI											
04 01 1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	410.750.330.514	745.415.863.300	0	0	1.156.166.193.874	444.925.257.662	681.334.214.020	0	0	1.126.259.471.682	(29.906.722.192)
04 02 2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	17.482.481.208	0	0	0	17.482.481.208	15.047.794.342	0	0	0	15.047.794.342	(2.434.686.866)
04 03 2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	22.962.044.840	0	0	0	22.962.044.840	20.979.385.724	0	0	0	20.979.385.724	(1.982.659.116)
04 04 2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	101.114.472.028	51.933.163.476	0	0	153.047.635.504	77.828.070.579	48.731.789.205	0	0	126.559.859.784	(26.487.775.720)
04 05 2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	158.026.066.877	0	0	0	158.026.066.877	153.445.374.048	0	0	0	153.445.374.048	(4.580.692.829)
04 06 2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	56.274.572.888	0	0	0	56.274.572.888	39.762.026.559	0	0	0	39.762.026.559	(16.512.546.329)
04 07 2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	11.580.509.200	0	0	0	11.580.509.200	9.855.662.290	0	0	0	9.855.662.290	(1.724.846.910)
04 08 2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	3.032.582.473	0	0	0	3.032.582.473	2.863.975.473	0	0	0	2.863.975.473	(168.607.000)
04 09 3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	31.026.154.770	14.592.580.033	0	0	45.618.734.803	28.824.343.636	14.244.851.233	0	0	43.069.194.869	(2.549.539.934)
04 10 3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	216.387.592.437	25.928.677.256	0	0	242.316.269.693	205.860.106.638	24.668.236.390	0	0	230.528.343.028	(11.787.926.665)
04 11 3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	22.300.758.646	4.852.600	0	0	22.305.611.246	21.572.279.834	4.852.600	0	0	21.577.132.434	(728.478.812)
04 12 3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.986.502.943	0	0	0	6.986.502.943	5.577.434.351	0	0	0	5.577.434.351	(1.409.068.592)
04 13 3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	40.679.982.108	568.010.531	0	0	41.247.992.639	37.379.933.518	351.105.425	0	0	37.731.038.943	(3.516.953.696)
04 14 3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	15.181.645.543	1.092.250.000	0	0	16.273.895.543	13.228.149.215	1.108.844.944	0	0	14.336.994.159	(1.936.901.384)

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP											
05 01 1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18.056.151.236	45.357.950	0	0	18.101.509.186	17.825.577.736	0	0	0	17.825.577.736	(275.931.450)
05 02 2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1.903.221.656	0	0	0	1.903.221.656	1.422.221.713	0	0	0	1.422.221.713	(480.999.943)
05 03 2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	56.914.687.250	40.012.374.196	0	0	96.927.061.446	51.080.512.193	32.919.042.159	0	0	83.999.554.352	(12.927.507.094)
05 04 3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	475.000.000	0	0	0	475.000.000	368.966.500	0	0	0	368.966.500	(106.033.500)
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM											
06 01 1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.304.904.720	3.659.850.000	0	0	9.964.754.720	5.617.711.882	133.200.000	0	0	5.750.911.882	(4.213.842.838)
06 02 1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	113.426.041.987	1.920.625.100	0	0	115.346.667.087	109.181.235.963	2.063.565.684	0	0	111.244.801.647	(4.101.865.440)
06 03 3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	16.473.820.620	0	0	0	16.473.820.620	14.003.606.393	0	0	0	14.003.606.393	(2.470.214.227)
07	KESEHATAN											
07 01 1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	574.983.147.127	87.067.517.257	0	0	662.050.664.384	589.186.980.431	83.505.539.172	0	0	672.692.519.603	10.641.855.219
07 02 2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.563.376.000	0	0	0	17.563.376.000	16.077.217.200	0	0	0	16.077.217.200	(1.486.158.800)
08	PARIWISATA											
08 01 3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	31.001.326.497	98.720.000	0	0	31.100.046.497	24.251.001.372	0	0	0	24.251.001.372	(6.849.045.125)
10	PENDIDIKAN											
10 01 1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	5.012.485.445.217	813.582.346.183	0	0	5.826.067.791.400	4.954.463.710.795	844.943.129.672	0	0	5.799.406.840.467	(26.660.950.933)
10 02 2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	525.095.207.336	60.718.200	0	0	525.155.925.536	520.054.732.899	396.181.790	0	0	520.450.914.689	(4.705.010.847)
10 03 2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	17.853.191.672	0	0	0	17.853.191.672	17.777.893.212	0	0	0	17.777.893.212	(75.298.460)
10 04 2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.395.341.500	652.546.800	0	0	2.047.888.300	1.100.369.123	623.590.400	0	0	1.723.959.523	(323.928.777)
11	PERLINDUNGAN SOSIAL											
11 01 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	46.618.202.566	613.940.086	0	0	47.232.142.652	43.445.381.685	543.058.184	0	0	43.988.439.869	(3.243.702.783)
11 02 2 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.807.447.678	0	0	0	5.807.447.678	5.126.071.578	0	0	0	5.126.071.578	(681.376.100)
11 03 3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	503.174.200	0	0	0	503.174.200	143.579.800	0	0	0	143.579.800	(359.594.400)
TOTAL		20.659.637.049.430	2.143.979.084.446	321.817.184.573	13.641.805.120.545	36.767.238.438.994	20.603.534.256.301	2.181.340.405.052	370.836.999.221	11.735.653.788.896	36.891.365.448.472	124.127.016.478

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
A SPM Bidang Pendidikan						
Pendidikan Menengah						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	6.900.048.393	13.465.562.473	6.565.514.080
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	54.597.000.000	54.597.000.000	0
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0	0	0
			Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	0	0	0
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	27.500.000.000	27.500.000.000	0
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	1.340.036.240.945	1.281.250.840.991	(58.785.399.954)
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	0
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	20.633.580.000	20.633.580.000	0
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	625.020.000	233.422.000	(391.598.000)
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	8.883.337.607	7.353.619.446	(1.529.718.161)
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	85.272.000	85.272.000	0
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	126.500.000	27.104.000	(99.396.000)
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	107.720.000	107.720.000	0
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10.000.000.000	14.532.000.000	4.532.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.250.000.000	1.250.000.000	0
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	308.100.000	217.475.000	(90.625.000)
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	160.891.635	149.011.635	(11.880.000)
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	0	0	0
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	972.000.000	514.000.000	(458.000.000)
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	146.340.000	59.450.000	(86.890.000)
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	0
			Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	0	0	0
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0	0
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0	0	0
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1.472.332.050.580	1.421.976.057.545	(50.355.993.035)
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						
			Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	3.400.000.000	3.200.000.000	(200.000.000)
			Pembangunan Ruang Praktik Siswa	55.503.920.000	55.503.920.000	0
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0	0	0
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	56.992.000.000	56.992.000.000	0
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	513.550.447.790	495.223.896.996	(18.326.550.794)
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	0
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	5.500.000.000	3.739.027.500	(1.760.972.500)
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0	0	0

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0	0	0
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2.198.654.800	2.198.654.800	0
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0	0
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0	0	0
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0	0	0
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.339.346.000	1.145.073.650	(194.272.350)
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.500.000.000	2.419.213.200	(80.786.800)
			Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	0	0	0
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	131.070.000	43.690.000	(87.380.000)
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	191.136.000	107.500.000	(83.636.000)
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	0	0	0
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	236.250.000	236.250.000	0
			Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	0	0	0
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	33.137.763.000	33.137.763.000	0
			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	8.060.127.000	9.780.069.243	1.719.942.243
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	759.745.200	7.759.745.200	7.000.000.000
			Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0
			Rehabilitasi Ruang Laboratorium	0	0	0
			Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0
			Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	0	0	0
			Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	0	0	0
			Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0	0
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0	0	0
			Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	0	0	0
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				683.500.459.790	671.486.803.589	(12.013.656.201)
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi						
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	8.622.780.000	6.866.687.676	(1.756.092.324)
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5.500.000.000	4.476.663.000	(1.023.337.000)
Jumlah Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi				14.122.780.000	11.343.350.676	(2.779.429.324)
Jumlah Pendidikan Menengah				2.169.955.290.370	2.104.806.211.810	(65.149.078.560)
Pendidikan Khusus						
Pengelolaan Pendidikan Khusus						
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.300.000.000	3.200.000.000	(100.000.000)
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0	0	0
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0	0	0
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	52.406.338.030	49.915.874.820	(2.490.463.210)
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	0

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	572.220.000	572.220.000	0
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	0	0	0
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	3.909.808.000	2.747.186.000	(1.162.622.000)
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0	0
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	0	0	0
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	0	0	0
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	461.646.000	220.718.000	(240.928.000)
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.000.000.000	925.980.000	(74.020.000)
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	200.748.000	106.980.000	(93.768.000)
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	14.030.883.000	14.030.883.000	0
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	433.236.000	162.504.000	(270.732.000)
			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	13.794.000.000	13.794.000.000	0
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Khusus	90.108.879.030	85.676.345.820	(4.432.533.210)
			Jumlah Pendidikan Khusus	90.108.879.030	85.676.345.820	(4.432.533.210)
			Jumlah SPM Bidang Pendidikan	2.260.064.169.400	2.190.482.557.630	(69.581.611.770)
B SPM Bidang Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi						
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	546.534.535	346.875.000	(199.659.535)
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	546.534.535	346.875.000	(199.659.535)
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	546.534.535	346.875.000	(199.659.535)
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi						
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	34.530.690	28.098.342	(6.432.348)
			Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	34.530.690	28.098.342	(6.432.348)
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	34.530.690	28.098.342	(6.432.348)
			Jumlah SPM Bidang Kesehatan	581.065.225	374.973.342	(206.091.883)
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota						
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.181.504.820	2.754.401.982	(427.102.838)
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.943.249.900	2.773.057.900	(170.192.000)
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.840.000.000	223.452.000	(3.616.548.000)
			Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	9.964.754.720	5.750.911.882	(4.213.842.838)
			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	9.964.754.720	5.750.911.882	(4.213.842.838)
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota						
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air	1.298.223.889	1.256.173.889	(42.050.000)

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Limbah Domestik (SPALD)			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	963.048.065	767.703.471	(195.344.594)
			Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	592.919.971	513.566.715	(79.353.256)
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	719.855.483	522.219.483	(197.636.000)
			Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	3.574.047.408	3.059.663.558	(514.383.850)
			Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	3.574.047.408	3.059.663.558	(514.383.850)
			Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	13.538.802.128	8.810.575.440	(4.728.226.688)
			D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
			Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi			
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	109.047.000	79.076.600	(29.970.400)
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	292.139.900	237.262.150	(54.877.750)
			Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	401.186.900	316.338.750	(84.848.150)
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	57.439.768.440	57.372.805.040	(66.963.400)
			Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	57.439.768.440	57.372.805.040	(66.963.400)
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.599.861.500	2.629.861.500	30.000.000
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0	0	0
			Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.599.861.500	2.629.861.500	30.000.000
			Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	60.440.816.840	60.319.005.290	(121.811.550)
			Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi			
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	292.139.900	264.537.900	(27.602.000)
			Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	292.139.900	264.537.900	(27.602.000)
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
			Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	496.618.965	0	(496.618.965)
			Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	496.618.965	0	(496.618.965)
			Jumlah Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	788.758.865	264.537.900	(524.220.965)
			Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	61.229.575.705	60.583.543.190	(646.032.515)
			E SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
			Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi			
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	0	0	0
			Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.200.000	3.200.000	0
			Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	668.147.260	668.147.260	0
			Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	671.347.260	671.347.260	0

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
		Jumlah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi		671.347.260	671.347.260	0
		Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		671.347.260	671.347.260	0
	F SPM Bidang Sosial					
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar di dalam Panti				
			Penyediaan Permakanan	1.782.108.994	1.104.978.997	(677.129.997)
			Penyediaan Sandang	918.380.000	704.082.000	(214.298.000)
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	156.728.000	156.728.000	0
			Penyediaan Alat Bantu	221.501.404	210.950.902	(10.550.502)
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	520.970.567	340.958.322	(180.012.245)
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.421.919.732	916.184.866	(505.734.866)
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	448.900.000	421.900.000	(27.000.000)
			Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	0	0	0
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	32.543.500	32.543.500	0
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	36.700.000	22.720.000	(13.980.000)
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	36.700.000	27.380.000	(9.320.000)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar	704.634.359	763.816.000	59.181.641
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	0	0	0
			Penyediaan Alat Bantu	0	0	0
			Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	0	0	0
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	0	0
		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar di dalam Panti		6.281.086.556	4.702.242.587	(1.578.843.969)
		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Dalam Panti		6.281.086.556	4.702.242.587	(1.578.843.969)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti				
			Pengasuhan	5.780.880	5.780.880	0
			Penyediaan Makanan	5.810.263.220	5.589.611.194	(220.652.026)
			Penyediaan Sandang	2.175.802.500	2.094.508.500	(81.294.000)
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	150.931.960	83.310.960	(67.621.000)
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	300.783.620	272.533.620	(28.250.000)
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.991.493.240	1.930.485.470	(61.007.770)
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	1.079.318.000	897.218.000	(182.100.000)
			Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	13.740.000	5.640.000	(8.100.000)
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.368.136.000	2.296.539.000	(71.597.000)
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	253.654.172	253.350.172	(304.000)
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	237.864.500	185.658.327	(52.206.173)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti	340.327.056	29.904.000	(310.423.056)
			Pengasuhan	0	0	0
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	0	0	0
		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti		14.728.095.148	13.644.540.123	(1.083.555.025)
		Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti		14.728.095.148	13.644.540.123	(1.083.555.025)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti				
			Penyediaan Permakanan	3.621.715.000	3.621.715.000	0

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Penyediaan Sandang	1.538.513.000	1.486.013.000	(52.500.000)
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	0	0	0
			Penyediaan Alat Bantu	0	0	0
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	199.944.000	251.603.302	51.659.302
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	285.705.600	285.705.600	0
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	0	0	0
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	0	0	0
			Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.960.000	0	(30.960.000)
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.960.000	0	(30.960.000)
			Pemulasaraan	210.000.000	210.000.000	0
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	245.739.820	245.739.820	0
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	0	0	0
			Penyediaan Alat Bantu	0	0	0
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	0	0	0
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	0	0	0
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	0	0
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	6.263.537.420	6.150.776.722	(112.760.698)
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Dalam Panti	6.263.537.420	6.150.776.722	(112.760.698)
			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
			Penyediaan Permakanan	1.060.628.130	1.056.545.400	(4.082.730)
			Penyediaan Sandang	426.660.000	426.660.000	0
			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	0	0	0
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	81.000.000	81.000.000	0
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	504.884.000	461.602.000	(43.282.000)
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	0	0	0
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	406.706.652	406.706.652	0
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	0	0	0
			Pemulangan ke Daerah Asal	943.639.712	806.735.698	(136.904.014)
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	0	0	0
			Penyediaan Permakanan	0	0	0
			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	0	0	0
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	0	0	0
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	0	0	0
			Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	3.423.518.494	3.239.249.750	(184.268.744)

ok

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			3.423.518.494	3.239.249.750	(184.268.744)
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi						
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						
			Penyediaan Permakanan	1.796.955.000	1.796.955.000	0
			Penyediaan Sandang	1.296.950.000	1.296.950.000	0
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.864.627.137	1.697.639.595	(166.987.542)
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	492.850.000	492.850.000	0
			Pelayanan Dukungan Psikososial	837.049.200	582.997.600	(254.051.600)
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			6.288.431.337	5.867.392.195	(421.039.142)
	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi			6.288.431.337	5.867.392.195	(421.039.142)
	Jumlah SPM Bidang Sosial			36.984.668.955	33.604.201.377	(3.380.467.578)

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	RPD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0	15.089.210.492.894	15.294.092.622.498	204.882.129.604	1 %
1	01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	11.163.051.415.488	11.075.449.031.287	(87.602.384.201)	1 %
1	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	5.336.983.624.088	5.276.042.190.820	(60.941.433.268)	1 %
1	01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0	5.811.945.011.400	5.788.063.489.791	(23.881.521.609)	0 %
1	01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	14.122.780.000	11.343.350.676	(2.779.429.324)	20 %
1	02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	2.043.320.949.002	2.371.254.382.827	327.933.433.825	16 %
1	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	1.381.270.284.618	1.698.561.863.224	317.291.578.606	23 %
1	02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	571.032.670.004	604.743.506.726	33.710.836.722	6 %
1	02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	88.870.041.209	65.924.798.006	(22.945.243.203)	26 %
1	02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0	287.252.900	287.252.900	0	0 %
1	02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	1.860.700.271	1.736.961.971	(123.738.300)	7 %
1	03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	1.432.482.929.843	1.414.550.453.426	(17.932.476.417)	1 %
1	03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	248.250.472.063	264.714.492.126	16.464.020.063	7 %
1	03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0	182.137.090.461	175.070.122.409	(7.066.968.052)	4 %
1	03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0	9.964.754.720	5.750.911.882	(4.213.842.838)	42 %
1	03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	8.802.461.778	9.180.811.082	378.349.304	4 %
1	03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	3.574.047.408	3.059.663.558	(514.383.850)	14 %
1	03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	304.689.603	276.505.603	(28.184.000)	9 %
1	03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0	45.100.408.776	43.088.788.852	(2.011.619.924)	4 %
1	03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	2.996.042.371	5.597.169.058	2.601.126.687	87 %
1	03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0	920.765.750.114	897.967.482.146	(22.798.267.968)	2 %
1	03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0	4.862.212.549	4.259.403.614	(602.808.935)	12 %
1	03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0	5.725.000.000	5.585.103.096	(139.896.904)	2 %
1	04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	175.458.863.368	173.218.118.702	(2.240.744.666)	1 %

PROVINSI JAWA BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian	RPD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	60.112.196.281	61.973.317.055	1.861.120.774	3 %
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0	61.229.575.705	60.583.543.190	(646.032.515)	1 %
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0	49.849.160.960	46.526.278.351	(3.322.882.609)	7 %
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0	4.267.930.422	4.134.980.106	(132.950.316)	3 %
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	87.105.963.103	77.370.246.003	(9.735.717.100)	11 %
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	53.239.249.525	50.631.772.292	(2.607.477.233)	5 %
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	22.195.031.839	16.872.552.414	(5.322.479.425)	24 %
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0	10.960.381.739	9.283.364.297	(1.677.017.442)	15 %
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0	711.300.000	582.557.000	(128.743.000)	18 %
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	187.790.372.090	182.250.390.253	(5.539.981.837)	3 %
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	134.269.798.101	132.394.558.189	(1.875.239.912)	1 %
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0	12.934.261.476	12.932.464.976	(1.796.500)	0 %
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0	33.650.000	33.650.000	0	0 %
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0	31.436.328.682	28.465.580.855	(2.970.747.827)	9 %
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0	2.605.748.485	2.334.590.029	(271.158.456)	10 %
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0	6.288.431.337	5.867.392.195	(421.039.142)	7 %
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0	222.154.009	222.154.009	0	0 %
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	846.624.507	1.915.571.498.756	1.827.574.566.646	(87.996.932.110)	5 %
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	143.437.854.993	136.579.707.399	(6.858.147.594)	5 %
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	125.955.373.785	121.531.913.057	(4.423.460.728)	4 %
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0	20.000.000	18.981.400	(1.018.600)	5 %
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0	6.202.397.324	5.666.026.724	(536.370.600)	9 %
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0	7.358.915.020	5.988.447.354	(1.370.467.666)	19 %
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0	1.778.563.798	1.582.548.798	(196.015.000)	11 %

**PROVINSI JAWA BARAT
 SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode	Uraian	RPD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%		
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0	2.122.605.066	1.791.790.066	(330.815.000)	16 %
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	32.439.227.828	30.714.450.533	(1.724.777.295)	5 %
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	26.631.780.150	25.588.378.955	(1.043.401.195)	4 %
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	2.635.165.000	2.270.524.100	(364.640.900)	14 %
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0	962.011.175	893.375.575	(68.635.600)	7 %
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	401.298.800	401.298.800	0	0 %
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0	520.000.000	507.456.000	(12.544.000)	2 %
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0	579.605.810	425.414.610	(154.191.200)	27 %
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0	709.366.893	628.002.493	(81.364.400)	11 %
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	119.150.194.664	119.753.192.282	602.997.618	1 %
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	96.188.149.824	98.773.806.558	2.585.656.734	3 %
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0	20.128.981.966	18.499.142.859	(1.629.839.107)	8 %
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0	425.780.154	407.200.154	(18.580.000)	4 %
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0	2.407.282.720	2.073.042.711	(334.240.009)	14 %
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	1.903.221.656	1.422.221.713	(480.999.943)	25 %
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	0	392.663.066	307.447.323	(85.215.743)	22 %
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	0	144.966.150	94.804.913	(50.161.237)	35 %
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0	195.768.347	116.711.393	(79.056.954)	40 %
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0	631.570.335	465.248.989	(166.321.346)	26 %
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0	538.253.758	438.009.095	(100.244.663)	19 %
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0	157.054.980.835	147.571.371.873	(9.483.608.962)	6 %
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	60.127.919.389	63.571.817.521	3.443.898.132	6 %
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	0	1.220.275.000	1.269.325.000	49.050.000	4 %
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0	4.556.622.436	5.100.960.514	544.338.078	12 %

**PROVINSI JAWA BARAT
 SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode			Uraian	RPD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0	482.513.400	482.513.400	0	0 %
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0	128.091.000	128.091.000	0	0 %
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0	780.482.582	853.126.582	72.644.000	9 %
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0	149.000.000	146.628.500	(2.371.500)	2 %
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	1.139.094.000	1.135.839.000	(3.255.000)	0 %
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	398.000.000	395.900.000	(2.100.000)	1 %
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0	2.531.851.000	2.428.547.000	(103.304.000)	4 %
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	85.541.132.028	72.058.623.356	(13.482.508.672)	16 %
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	17.168.946.490	16.784.375.039	(384.571.451)	2 %
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	15.219.398.090	15.075.826.639	(143.571.451)	1 %
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0	717.048.400	655.502.400	(61.546.000)	9 %
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0	282.500.000	223.546.000	(58.954.000)	21 %
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0	850.000.000	762.215.000	(87.785.000)	10 %
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0	100.000.000	67.285.000	(32.715.000)	33 %
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	109.057.807.525	104.452.576.571	(4.605.230.954)	4 %
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	42.331.461.272	42.117.821.240	(213.640.032)	1 %
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	0	318.346.700	306.599.700	(11.747.000)	4 %
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0	221.520.550	161.889.900	(59.630.650)	27 %
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0	40.139.161.110	38.144.309.588	(1.994.851.522)	5 %
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0	26.047.317.893	23.721.956.143	(2.325.361.750)	9 %
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	17.563.376.000	16.077.217.200	(1.486.158.800)	8 %

OK

PROVINSI JAWA BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian	RPD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0	8.174.511.400	6.044.161.400	(2.130.350.000)	26 %
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0	800.760.000	755.760.000	(45.000.000)	6 %
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0	8.588.104.600	9.277.295.800	689.191.200	8 %
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	0	265.632.794.134	236.501.143.755	(29.131.650.379)	11 %
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	112.585.158.630	109.941.283.971	(2.643.874.659)	2 %
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0	147.498.289.541	121.282.391.998	(26.215.897.543)	18 %
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0	4.465.148.763	4.193.270.586	(271.878.177)	6 %
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	0	1.084.197.200	1.084.197.200	0	0 %
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	224.374.387.214	215.222.806.204	(9.151.581.010)	4 %
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	66.348.320.337	61.777.432.156	(4.570.888.181)	7 %
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0	48.848.274.199	44.969.735.030	(3.878.539.169)	8 %
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0	109.177.792.678	108.475.639.018	(702.153.660)	1 %
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	94.157.196.449	81.659.575.204	(12.497.621.245)	13 %
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	37.882.623.561	41.897.548.645	4.014.925.084	11 %
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0	1.500.000.000	1.391.200.000	(108.800.000)	7 %
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	989.162.400	887.584.400	(101.578.000)	10 %
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0	562.980.300	475.910.300	(87.070.000)	15 %
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	10.623.128.000	10.578.128.000	(45.000.000)	0 %
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	7.310.443.019	5.339.810.658	(1.970.632.361)	27 %
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	19.300.000.000	9.105.746.267	(10.194.253.733)	53 %
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	15.988.859.169	11.983.646.934	(4.005.212.235)	25 %
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	62.211.798.455	58.179.114.076	(4.032.684.379)	6 %
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	50.631.289.255	48.323.451.786	(2.307.837.469)	5 %
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0	5.745.874.800	5.355.336.887	(390.537.913)	7 %
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0	3.046.365.000	2.038.160.593	(1.008.204.407)	33 %

PROVINSI JAWA BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	RPD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%		
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0	1.100.000.000	826.923.000	(273.077.000)	25 %
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	878.783.200	878.783.200	0	0 %
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0	809.486.200	756.458.610	(53.027.590)	7 %
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	570.824.710.152	565.052.744.049	(5.771.966.103)	1 %
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	45.668.784.616	44.601.829.360	(1.066.955.256)	2 %
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0	18.074.701.600	16.693.635.216	(1.381.066.384)	8 %
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	0	499.986.223.936	496.743.925.633	(3.242.298.303)	1 %
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0	7.095.000.000	7.013.353.840	(81.646.160)	1 %
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	2.411.032.700	2.094.033.169	(316.999.531)	13 %
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0	2.411.032.700	2.094.033.169	(316.999.531)	13 %
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	3.032.582.473	2.863.975.473	(168.607.000)	6 %
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0	3.032.582.473	2.863.975.473	(168.607.000)	6 %
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	40.538.359.979	41.381.271.735	842.911.756	2 %
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	22.685.168.307	23.603.378.523	918.210.216	4 %
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0	12.222.174.672	12.398.837.919	176.663.247	1 %
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0	830.000.000	736.778.293	(93.221.707)	11 %
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0	4.801.017.000	4.642.277.000	(158.740.000)	3 %
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	53.444.403.058	50.430.656.714	(3.013.746.344)	6 %
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	51.396.514.758	48.706.697.191	(2.689.817.567)	5 %
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	1.801.759.000	1.528.821.768	(272.937.232)	15 %
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	246.129.300	195.137.755	(50.991.545)	21 %
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	846.624.507	1.168.624.151	834.133.657	(334.490.494)	29 %
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	718.181.289	484.054.918	323.278.174	(160.776.744)	33 %
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	128.443.218	684.569.233	510.855.483	(173.713.750)	25 %
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	51.688.236.000	1.221.935.187.862	1.191.434.246.293	(30.500.941.569)	2 %
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	125.184.028.427	121.650.773.431	(3.533.254.996)	3 %

PROVINSI JAWA BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian	RPD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	79.565.293.624	78.581.578.562	(983.715.062)	1 %
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0	14.203.699.213	13.500.073.213	(703.626.000)	5 %
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0	5.680.802.281	5.416.926.921	(263.875.360)	5 %
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0	14.342.532.773	13.879.566.573	(462.966.200)	3 %
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	5.439.904.499	5.343.629.925	(96.274.574)	2 %
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0	5.951.796.037	4.928.998.237	(1.022.797.800)	17 %
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0	84.456.599.419	77.735.903.925	(6.720.695.494)	8 %
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	53.356.552.922	53.484.902.553	128.349.631	0 %
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0	7.052.546.497	5.777.596.355	(1.274.950.142)	18 %
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0	12.547.500.000	10.297.587.979	(2.249.912.021)	18 %
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	11.500.000.000	8.175.817.038	(3.324.182.962)	29 %
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0	479.263.300.649	470.994.287.483	(8.269.013.166)	2 %
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	236.947.030.956	240.465.944.455	3.518.913.499	1 %
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0	60.194.914.702	59.275.112.388	(919.802.314)	2 %
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0	46.362.329.686	44.969.604.507	(1.392.725.179)	3 %
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	6.618.581.771	6.153.894.609	(464.687.162)	7 %
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0	35.253.573.067	38.536.803.397	3.283.230.330	9 %
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	0	644.713.680	644.713.680	0	0 %
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0	93.242.156.787	80.948.214.447	(12.293.942.340)	13 %
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0	242.594.071.383	245.381.305.047	2.787.233.664	1 %
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	219.813.460.137	223.435.206.113	3.621.745.976	2 %
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0	21.771.593.349	21.084.018.537	(687.574.812)	3 %
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	0	250.000.000	161.800.000	(88.200.000)	35 %
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0	534.017.897	493.113.897	(40.904.000)	8 %
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	0	225.000.000	207.166.500	(17.833.500)	8 %

**PROVINSI JAWA BARAT
 SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode	Uraian	RPD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
	(DAS)					
3	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 51.688.236.000	131.514.510.883	124.058.823.568	(7.455.687.315)	6 %
3	29	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0	90.133.350.574	90.658.571.046	525.220.472	1 %
3	29	02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN 113.400.000.000	3.209.585.363	2.702.316.602	(507.268.761)	16 %
3	29	03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 31.819.500.000	3.776.917.580	2.875.117.749	(901.799.831)	24 %
3	29	05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 306.684.000.000	17.920.836.746	13.819.211.778	(4.101.624.968)	23 %
3	29	06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 11.813.888.000	16.473.820.620	14.003.606.393	(2.470.214.227)	15 %
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0	48.310.552.141	44.690.006.301	(3.620.545.840)	7 %
3	30	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0	7.062.559.502	6.958.967.358	(103.592.144)	1 %
3	30	02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0	431.228.440	470.146.040	38.917.600	9 %
3	30	03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0	801.379.275	457.879.275	(343.500.000)	43 %
3	30	04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 0	16.012.049.845	15.918.106.565	(93.943.280)	1 %
3	30	05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0	5.571.564.760	4.314.277.580	(1.257.287.180)	23 %
3	30	06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0	13.539.807.231	12.907.342.655	(632.464.576)	5 %
3	30	07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0	4.891.963.088	3.663.286.828	(1.228.676.260)	25 %
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0	110.108.950.760	106.779.566.738	(3.329.384.022)	3 %
3	31	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0	93.835.055.217	92.442.572.579	(1.392.482.638)	1 %
3	31	02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0	15.813.743.703	13.916.842.319	(1.896.901.384)	12 %
3	31	03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0	175.000.000	150.000.000	(25.000.000)	14 %
3	31	04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0	285.151.840	270.151.840	(15.000.000)	5 %
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0	503.174.200	143.579.800	(359.594.400)	71 %
3	32	03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0	503.174.200	143.579.800	(359.594.400)	71 %
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0	2.078.828.085.727	1.943.041.292.006	(135.786.793.721)	7 %
4	01	SEKRETARIAT DAERAH 0	1.389.336.238.098	1.293.679.269.902	(95.656.968.196)	7 %
4	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0	484.452.307.522	458.732.767.788	(25.719.539.734)	5 %
4	01	02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 0	2.549.350.000	2.549.350.000	0	0 %
4	01	03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 0	23.984.190.166	19.085.586.589	(4.898.603.577)	20 %
4	01	04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 0	850.527.039.738	791.803.980.060	(58.723.059.678)	7 %

PROVINSI JAWA BARAT
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian	RPD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0	6.161.410.938	4.656.914.492	(1.504.496.446)	24 %
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0	13.886.594.574	11.382.374.707	(2.504.219.867)	18 %
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	7.120.455.480	5.088.406.586	(2.032.048.894)	29 %
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	654.889.680	379.889.680	(275.000.000)	42 %
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0	689.491.847.629	649.362.022.104	(40.129.825.525)	6 %
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	349.499.577.426	393.537.523.428	44.037.946.002	13 %
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0	339.992.270.203	255.824.498.676	(84.167.771.527)	25 %
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	0	14.928.485.433.190	15.038.870.841.970	110.385.408.780	1 %
5	01		PERENCANAAN	0	83.261.801.797	80.381.974.385	(2.879.827.412)	3 %
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	57.350.392.858	59.177.044.209	1.826.651.351	3 %
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0	13.666.182.139	10.819.897.269	(2.846.284.870)	21 %
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	12.245.226.800	10.385.032.907	(1.860.193.893)	15 %
5	02		KEUANGAN	0	14.656.792.973.142	14.774.652.749.888	117.859.776.746	1 %
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	615.374.725.244	599.950.827.162	(15.423.898.082)	3 %
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	13.979.662.834.499	14.119.161.427.433	139.498.592.934	1 %
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0	10.003.280.160	7.378.106.016	(2.625.174.144)	26 %
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0	51.752.133.239	48.162.389.277	(3.589.743.962)	7 %
5	03		KEPEGAWAIAN	0	81.413.500.362	83.161.090.935	1.747.590.573	2 %
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	60.733.515.127	62.841.260.689	2.107.745.562	3 %
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0	20.679.985.235	20.319.830.246	(360.154.989)	2 %
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	68.232.992.963	63.344.263.608	(4.888.729.355)	7 %
5	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	56.638.418.713	51.749.689.358	(4.888.729.355)	9 %
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	11.594.574.250	11.594.574.250	0	0 %
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	25.527.860.198	24.500.370.139	(1.027.490.059)	4 %
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	20.257.348.351	20.131.623.533	(125.724.818)	1 %
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	5.270.511.847	4.368.746.606	(901.765.241)	17 %
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG	0	13.256.304.728	12.830.393.015	(425.911.713)	3 %
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	12.046.994.008	11.743.067.775	(303.926.233)	3 %

**PROVINSI JAWA BARAT
 SINKRONISASI PROGRAM PADA RPD DENGAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode			Uraian	RPD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	0	1.209.310.720	1.087.325.240	(121.985.480)	10 %
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	120.851.144.167	121.023.663.960	172.519.793	0 %
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	120.851.144.167	121.023.663.960	172.519.793	0 %
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	65.594.059.815	63.478.967.059	(2.115.092.756)	3 %
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0	46.433.422.132	45.296.629.061	(1.136.793.071)	2 %
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0	8.823.662.220	12.248.067.840	3.424.405.620	39 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	1.430.277.433.144	1.489.147.427.877	58.869.994.733	4 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	1.430.277.433.144	1.489.147.427.877	58.869.994.733	4 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	29.685.178.675	29.388.246.372	(296.932.303)	1 %
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	2.973.500.000	3.810.623.408	837.123.408	28 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0	1.375.428.240.869	1.434.966.866.730	59.538.625.861	4 %
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	19.947.013.600	18.850.000.000	(1.097.013.600)	5 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	943.500.000	1.121.911.369	178.411.369	19 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	1.300.000.000	1.009.779.998	(290.220.002)	22 %

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
					Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0004	167.408.400	167.408.400	167.408.400
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0005	206.918.000	206.918.000	206.918.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0006	209.779.998	209.779.998	209.779.998
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	01	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	02	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	03	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	04	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	05	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	06	0	0	0

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	440.828.998	0	0	0	441.428.998	0	0	0	441.428.998	100	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM											
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	900.000.000	0	0	0	791.200.000	0	0	0	791.200.000	100	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	562.980.300	0	0	0	475.910.300	0	0	0	475.910.300	100	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	10.623.128.000	0	0	0	10.578.128.000	0	0	0	10.578.128.000	100	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	6.573.443.019	0	0	0	4.602.810.658	0	0	0	4.602.810.658	100	
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)											
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	19.300.000.000	0	0	0	9.105.746.267	0	0	0	9.105.746.267	100	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	605.000.000	0	0	0	335.984.000	0	0	0	335.984.000	100	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.084.000	0	0	0	56.355.200	0	0	0	56.355.200	100	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.758.398.000	0	0	0	1.785.345.593	0	0	0	1.785.345.593	100	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
		Dinas Kelautan dan Perikanan	64.603.650	978.664.900	0	0	63.855.650	773.384.550	0	0	837.240.200	100	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											
		Dinas Kelautan dan Perikanan	801.539.189	0	0	0	701.539.189	0	0	0	701.539.189	100	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.056.465.280	0	0	0	5.202.175.280	0	0	0	5.202.175.280	100	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
		Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	62.040.000	0	0	0	62.040.000	0	0	0	62.040.000	100	
		Dinas Perkebunan	317.782.970	0	0	0	183.960.431	0	0	0	183.960.431	100	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											
		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	232.140.250	0	0	0	219.375.250	0	0	0	219.375.250	100	
		Dinas Perkebunan	4.164.294.208	0	0	0	3.650.451.003	0	0	0	3.650.451.003	100	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											

PROVINSI JAWA BARAT
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
			Dinas Perkebunan	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	100
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
			Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	1.000.000.000	0	0	0	863.683.600	0	0	0	863.683.600	100
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
			Dinas Perkebunan	2.001.385.887	0	0	0	1.704.677.500	0	0	0	1.704.677.500	100
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN													
			Dinas Perkebunan	449.713.680	0	0	0	449.713.680	0	0	0	449.713.680	100
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
			Dinas Perkebunan	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	100
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
			Dinas Kehutanan	547.451.180	0	0	0	562.935.245	0	0	0	562.935.245	100
2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan													
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA													
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31.682.739.726	0	0	0	31.051.413.010	0	0	0	31.051.413.010	2.052
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
			Dinas Pendidikan	100.742.000	0	0	0	100.742.000	0	0	0	100.742.000	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN													
			Dinas Pendidikan	604.600.000	0	0	0	594.600.000	0	0	0	594.600.000	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
			Dinas Kesehatan	285.794.236	0	0	0	412.495.948	0	0	0	412.495.948	100
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
			Dinas Kesehatan	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
			Dinas Kesehatan	9.828.612.915	0	0	0	6.156.112.915	0	0	0	6.156.112.915	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	103.896.808.442	0	0	0	100.698.222.739	0	0	0	100.698.222.739	100
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA													
			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	372.671.200	0	0	0	372.671.200	0	0	0	372.671.200	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	7.500.000	0	0	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000	100
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	1.506.354.600	0	0	0	1.245.870.300	0	0	0	1.245.870.300	100
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK													
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan	150.000.000	0	0	0	68.635.600	0	0	0	68.635.600	100

OK

PROVINSI JAWA BARAT
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah		
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	%	
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
			Keluarga Berencana											
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA											
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	600.000.000	0	0	0	600.000.000	0	0	0	600.000.000	100	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.500.000.000	0	0	0	1.988.443.519	0	0	0	1.988.443.519	100	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	199.265.000	0	0	0	174.481.300	0	0	0	174.481.300	100	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
			Inspektorat	3.616.410.000	0	0	0	3.916.717.000	0	0	0	3.916.717.000	100	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan													
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN											
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	800.000.000	0	0	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000	100	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1.023.877.399	0	0	0	810.357.144	0	0	0	810.357.144	100	
			Dinas Sumber Daya Air	0	103.836.900	0	0	0	264.843.066	0	0	264.843.066	100	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											
			Dinas Perumahan dan Permukiman	3.181.504.820	0	0	0	2.754.401.982	0	0	0	2.754.401.982	100	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
			Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	1.180.548.000	88.002.665.459	0	0	998.857.530	81.992.626.249	0	0	82.991.483.779	100	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	19.693.801.362	0	0	0	19.551.985.578	0	0	0	19.551.985.578	100	
			Dinas Kehutanan	0	47.898.200	0	0	0	10.100.000	0	0	10.100.000	100	
			Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	160.950.000	0	0	160.950.000	100	
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	44.500.000	0	0	0	323.248.000	0	0	0	323.248.000	100	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.027.343.420	0	0	0	1.026.702.213	0	0	0	1.026.702.213	100	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim													
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
			Dinas Lingkungan Hidup	6.545.448	379.477.920	0	0	17.532.783	947.196.298	0	0	964.729.081	100	
			Dinas Kehutanan	0	374.898.000	0	0	0	254.744.900	0	0	254.744.900	100	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN											
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	124.774.500	521.999.420	0	0	85.646.400	501.318.270	0	0	586.964.670	100	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik													
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
			Satuan Polisi dan Pamong	668.147.260	0	0	0	668.147.260	0	0	0	668.147.260	100	

PROVINSI JAWA BARAT
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD-P				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	%
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
			Praja										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
			Dinas Komunikasi dan Informatika	71.600.000	0	0	0	91.600.000	0	0	0	91.600.000	100
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH													
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000	0	0	0	265.597.500	0	0	0	265.597.500	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
			Badan Pendapatan Daerah	240.571.400	0	0	0	197.333.010	0	0	0	197.333.010	100
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	162.190.000	0	0	0	112.612.369	0	0	0	112.612.369	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
			Badan Penghubung	29.000.000	0	0	0	12.828.000	0	0	0	12.828.000	100
			Inspektorat	60.947.000	0	0	0	60.947.000	0	0	0	60.947.000	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN													
			Inspektorat	7.800.444.600	0	0	0	8.621.412.100	0	0	0	8.621.412.100	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	346.962.000	0	0	0	107.113.700	0	0	0	107.113.700	100

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT								
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN								
TAHUN 2024								
GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	PELAKSANA	
PNS								
Golongan IV/e	1	3	-	-	-	14	-	18
Golongan IV/d	-	25	-	-	-	31	-	56
Golongan IV/c	-	16	3	-	-	899	2	920
Golongan IV/b	-	3	137	6	-	4.371	6	4.523
Golongan IV/a	-	1	166	87	-	4.411	195	4.860
JUMLAH GOLONGAN IV	1	48	306	93	-	9.726	203	10.377
Golongan III								
Golongan III/d	-	-	26	91	-	5.100	772	5.989
Golongan III/c	-	-	2	18	-	2.520	706	3.246
Golongan III/b	-	-	-	3	-	2.229	902	3.134
Golongan III/a	-	-	-	-	-	1.878	1.478	3.356
JUMLAH GOLONGAN III	-	-	28	112	-	11.727	3.858	15.725
Golongan II								
Golongan II/d	-	-	-	-	-	129	666	795
Golongan II/c	-	-	-	-	-	142	1.130	1.272
Golongan II/b	-	-	-	-	-	4	145	149
Golongan II/a	-	-	-	-	-	83	194	277
JUMLAH GOLONGAN II	-	-	-	-	-	358	2.135	2.493
Golongan I								
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	49	49
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	49	49
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH GOLONGAN I	-	-	-	-	-	-	99	99
JUMLAH PNS	1	48	334	205	-	21.811	6.295	28.694
PPPK								
Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan V	-	-	-	-	-	53	-	53
Golongan VI	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan VII	-	-	-	-	-	1.141	-	1.141
Golongan VIII	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IX	-	-	-	-	-	20.523	-	20.523
Golongan X	-	-	-	-	-	355	-	355
Golongan XI	-	-	-	-	-	9	-	9
Golongan XII	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan XIII	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan XIV	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan XV	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan XVI	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan XVII	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah PPPK	-	-	-	-	-	22.081	-	22.081
JUMLAH								50.775

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

**PROVINSI JAWA BARAT
 DAFTAR PIUTANG DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian Rincian Piutang	Jumlah Piutang Sampai Dengan Tahun N-2 (saldo akhir 2022)	Perkiraan Penambahan Tahun N-1 (2023)	Perkiraan Pengurangan Tahun N-1 (2023)	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1 (2023)
1	Piutang Pajak Air Permukaan	10.354.978.800	63.648.485.324	70.684.218.793	3.319.245.331
2	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	308.430.973.212	3.242.276.081.915	3.237.750.571.540	312.956.483.587
3	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	9.201.226.492.084	9.201.226.492.084	-
4	Piutang Pajak Rokok	-	3.632.126.670.549	3.632.126.670.549	-
5	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	6.012.584.951.200	6.012.584.951.200	-
6	Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	308.940.000	308.940.000	-
7	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.131.000	23.664.521.668	23.624.096.168	59.556.500
8	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	11.052.057.000	11.052.057.000	-
9	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	495.911.540	13.103.227.708	13.101.767.708	497.371.540
10	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.907.700	8.145.704.100	8.139.173.800	11.438.000
11	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	1.560.889.500	1.560.889.500	-
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.300.000.000	549.269.697.319	541.138.347.205	14.431.350.114
13	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	42.316.667	788.365.492		
14	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	46.310.550	46.310.550	-
15	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD	17.520.286.899	736.784.609.579	702.692.127.406	51.612.769.072
16	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan dari Pengembalian	160.795.421.654	18.704.624.193		
17	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan	-	91.128.551	91.128.551	-
18	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	717.054.400	50.481.800	551.446.200	216.090.000
19	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	6.400.580	6.400.580	-
20	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	57.120	57.120	-
21	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama Daerah	4.585.832.200	29.313.503.300	30.599.972.900	3.299.362.600
22	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Remunerasi Treasury Deposit Facility (TDF)	52.848.185	-	52.848.185	-
23	Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	399.409.300	-	-	399.409.300
24	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	16.564.949.962	-	2.625.000	16.562.324.962
25	Bagian Lancar Piutang Sewa	562.369.000	-	549.994.000	12.375.000
26	Bagian Lancar Piutang Kerjasama	10.178.053.800	6.289.162.000	6.531.991.000	9.935.224.800
27	Piutang Lainnya	715.521.245	115.670.993	120.670.993	710.521.245
	JUMLAH PIUTANG LANCAR	537.739.965.564	23.551.158.032.525	23.609.001.080.609	479.896.917.480
1	Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama	164.883.112.370	-	6.289.162.000	158.593.950.370
2	Bagian Jangka Panjang Piutang Lainnya	3.901.276.369	-	3.901.276.369	-
	JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	168.784.388.739	-	10.190.438.369	158.593.950.370
	JUMLAH PIUTANG	706.524.354.303	23.551.158.032.525	23.619.191.518.978	638.490.867.850

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini (2024)	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
1	1999	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	Perda No.11 Tahun 2009	Saham	2.040.000.000.000,00	1.417.804.159.814,00	-	1.417.804.159.814,00	622.195.840.186,00	385.254.055.155,00	-	1.417.804.159.814,00
2	2007	PT Agronesia	Perda No.12 Tahun 2017	Saham	262.500.000.000,00	255.000.000.000,00	-	255.000.000.000,00	7.500.000.000,00	-	-	255.000.000.000,00
3	2008	PT Tirta Gemah Ripah	Perda No.6 Tahun 2022	Saham	382.500.000.000,00	319.100.000.000,00	-	319.100.000.000,00	63.400.000.000,00	-	-	319.100.000.000,00
4	2010	PT Jasa Sarana	Perda No.2 Tahun 2018	Saham	1.020.000.000.000,00	830.003.000.000,00	-	830.003.000.000,00	189.997.000.000,00	-	-	830.003.000.000,00
5	1998	PD Agribisnis dan Pertambangan	Perda No.31 Tahun 2010	Saham	72.771.688.651,00	72.771.688.651,00	-	72.771.688.651,00	-	-	-	72.771.688.651,00
6	1998	PT Jasa dan Kepariwisata Jabar	Perda No.3 Tahun 2018	Saham	3.500.000.000.000,00	2.901.957.000.000,00	-	2.901.957.000.000,00	598.043.000.000,00	200.000.000,00	-	2.901.957.000.000,00
7	2012	PT Jamkrida Jabar	Perda No.3 Tahun 2024	Saham	530.971.200.000,00	260.080.000.000,00	-	260.080.000.000,00	270.891.200.000,00	5.581.084.280,00	-	260.080.000.000,00
8	1999	PT Asuransi Bangun Askrida	Perda No.22 Tahun 2011	Saham	50.000.000.000,00	1.310.000.000,00	-	1.310.000.000,00	48.690.000.000,00	-	-	1.310.000.000,00
9	2012	PT Agro Jabar	Perda No.18 Tahun 2012	Saham	76.500.000.000,00	55.474.000.000,00	-	55.474.000.000,00	21.026.000.000,00	-	-	55.474.000.000,00
10	2014	PT. Bandarudara Internasional Jawa Barat	Perda No.1 Tahun 2018	Saham	2.500.000.000.000,00	1.621.523.000.000,00	52.000.000.000,00	1.673.523.000.000,00	826.477.000.000,00	-	-	1.673.523.000.000,00
11	2021	PT BPR Intan Jabar	Perda No.10 Tahun 2016	Saham	44.880.000.000,00	37.500.000.000,00	-	37.500.000.000,00	7.380.000.000,00	-	-	37.500.000.000,00
12	2021	PT BPR Karya Utama Jabar	Perda No.10 Tahun 2016	Saham	35.700.000.000,00	23.046.750.000,00	-	23.046.750.000,00	12.653.250.000,00	397.191.482,00	-	23.046.750.000,00
13	2021	PT BPR Cianjur Jabar	Perda No.10 Tahun 2016	Saham	45.900.000.000,00	11.665.566.750,00	-	11.665.566.750,00	34.234.433.250,00	159.677.061,00	-	11.665.566.750,00
14	2021	PT BPR Cipatujah Jabar	Perda No.10 Tahun 2016	Saham	20.400.000.000,00	10.997.490.000,00	-	10.997.490.000,00	9.402.510.000,00	1.762.711.133,00	-	10.997.490.000,00
15	2017	PT BPR Bogor Jabar	Perda No.7 Tahun 2021	Saham	36.720.000.000,00	7.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00	29.720.000.000,00	218.918.205,00	-	-
16	2017	PT BPR Indramayu Jabar	Perda No.7 Tahun 2021	Saham	22.440.000.000,00	4.200.000.000,00	-	4.200.000.000,00	18.240.000.000,00	-	-	-

PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini (2024)	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
17	2017	PT BPR Cirebon Jabar	Perda No.7 Tahun 2021	Saham	30.600.000.000,00	6.300.000.000,00		6.300.000.000,00	24.300.000.000,00	1.280.968.497,00		
18	2017	PT BPR Serang Perseroda	Perda Kab. Serang No.7 Tahun 2018	Saham	3.450.548.950,00	3.450.548.950,00		3.450.548.950,00	-	394.913.988,00		
19	2017	PT. BPR Kertaraharja Gemilang	Perda Kab. Tangerang No.9 Tahun 2019	Saham	600.000.000,00	600.000.000,00		600.000.000,00	-	20.961.370,00		
20	2017	PT BPR Berkah Pandeglang Perseroda	Perda Kab. Pandeglang No.9 Tahun 2016	Saham	300.000.000,00	300.000.000,00		300.000.000,00	-	60.504.259,00		
21	2017	PT BPR Lebak Sejahtera Perseroda	Perda Kab. Lebak No.7 Tahun 2015	Saham	900.000.000,00	900.000.000,00		900.000.000,00	-	106.928.054,00		
22	2017	PT Lembaga Keuangan Mikro	Perda No.11 Tahun 2015	Saham	26.524.334.250,00	26.524.334.250,00	-	26.524.334.250,00	-	52.255.774,00	-	26.524.334.250,00
23	2014	PT Migas Utama Jabar	Perda No.7 Tahun 2022	Saham	50.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00	15.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00
24	2014	PT Migas Hilir Jabar	Perda No.11 Tahun 2014	Saham	140.000.000.000,00	35.000.000.000,00	-	35.000.000.000,00	105.000.000.000,00	-	-	35.000.000.000,00
25	2021	PT BPR Wibawa Mukti Jabar	Perda No.10 Tahun 2016	Saham	26.520.000.000,00	18.000.000.000,00	-	18.000.000.000,00	8.520.000.000,00	-	-	18.000.000.000,00
26	2021	PT BPR Majalengka Jabar	Perda No.10 Tahun 2016	Saham	9.996.000.000,00	9.996.000.000,00	-	9.996.000.000,00	-	-	-	9.996.000.000,00
27	2021	PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar	Perda No.10 Tahun 2016	Saham	4.080.000.000,00	4.080.000.000,00	-	4.080.000.000,00	-	105.586.017,00	-	4.080.000.000,00
28	2021	PT BPR Karawang Jabar	Perda No.10 Tahun 2016	Saham	6.075.000.000,00	2.500.000.000,00	-	2.500.000.000,00	3.575.000.000,00	-	-	2.500.000.000,00
Jumlah					10.940.328.771.851,00	7.972.083.131.414,79	52.000.000.000,00	8.024.083.538.415,00	2.916.245.233.436,00	430.595.755.275,00	-	8.001.332.989.465,00

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN - LAIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada Akhir Tahun T-2	Perkiraan Penambahan Tahun T-1	Perkiraan Pengurangan Tahun T-1	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun T-1
1	2	3	4	5	6	7
A	ASET TETAP					
1	Tanah		12.730.040.835.804,00	363.719.213.935,00	350.995.301.271,00	12.742.764.748.468,00
2	Peralatan dan Mesin		8.349.955.680.051,00	986.250.460.769,00	116.890.923.280,00	9.219.315.217.540,00
3	Gedung dan Bangunan		11.146.691.343.801,00	1.897.482.807.991,00	1.286.602.803.077,00	11.757.571.348.715,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan		10.897.333.786.667,00	1.015.839.683.135,00	120.923.986.771,00	11.792.249.483.031,00
5	Aset Tetap Lainnya		1.394.904.992.371,00	160.656.464.948,00	16.648.557.105,00	1.538.912.900.214,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		376.470.138.528,00	107.228.511.876,00	180.904.524.788,00	302.794.125.616,00
7	Akumulasi Penyusutan		(16.984.215.682.289,00)	(1.730.316.291.299,00)	56.027.110.613,00	(18.658.504.862.975,00)
	Jumlah Aset Tetap		27.911.181.094.933,00	2.800.860.851.355,00	2.128.993.206.905,00	28.695.102.960.609,00
B	ASET LAIN-LAIN					
1	Bagian Jangka Panjang Piutang Kerjasama		164.883.112.370,00	0,00	6.289.162.000,00	158.593.950.370,00
2	Bagian Jangka Panjang Piutang Lainnya		3.901.276.369,00	0,00	3.901.276.369,00	0,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		529.986.735.367,00	27.933.640.904,00	7.337.085.719,00	550.583.290.552,00
4	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga		(30.615.282.301,00)	(6.794.438.663,00)	5.104.559.887,00	(32.305.161.077,00)
5	Aset Tak Berwujud		1.081.739.610,00	204.444.660,00	0,00	1.286.184.270,00
6	Amortisasi		(470.588.237,00)	(227.507.562,00)	0,00	(698.095.799,00)
7	Aset Lain-lain		1.809.787.879.540,00	47.224.555.517,00	35.758.858.723,00	1.821.253.576.334,00
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(911.486.811.393,00)	(15.956.308.160,00)	11.426.613.040,00	(916.016.506.513,00)
9	Dana Alokasi Umum Treasury Deposit Facility (TDF)		52.848.185,00	0,00	52.848.185,00	0,00
	Jumlah Aset Lain-lain		1.567.120.909.510,00	52.384.386.696,00	69.870.403.923,00	1.582.697.238.137,00
	Jumlah Aset		29.478.302.004.443,00	2.853.245.238.051,00	2.198.863.610.828,00	30.277.800.198.746,00

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 18 Oktober 2024

PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS*)
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst.								
			Jumlah					

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

**PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024	200.000.000.000	-	200.000.000.000	-	200.000.000.000	800.000.000.000
2	Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024	800.000.000.000	200.000.000.000	800.000.000.000	563.789.491.913	436.210.508.087	-
3	Anggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024	-	436.210.508.087	-	436.210.508.087	-	-

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN

PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran s.d Tahun Lalu		Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)				Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pemotongan DAU - Pokok Pinjaman Daerah	Pengembalian Sisa Dana di RKUD	Pemotongan DAU - Pokok Pinjaman Daerah	Biaya Pengelolaan	Biaya Provisi	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PT. Sarana Multi Infrastruktur	- PP 43/2020 tentang Perubahan PP 23/2020 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 - Perjanjian Pemberian Pinjaman	24 September 2020	376.727.246.066	8	0,00%	Percepatan Pemulihan Ekonomi di daerah akibat COVID-19	62.787.874.356	1	62.787.874.356	493.669.662	0	0	251.151.497.353	0
2	PT. Sarana Multi Infrastruktur	- PP 43/2020 tentang Perubahan PP 23/2020 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 - Perjanjian Pemberian Pinjaman	24 September 2020	1.116.359.020.622	8	0,00%	Percepatan Pemulihan Ekonomi di daerah akibat COVID-19	186.059.836.776	14.316.022.808	186.059.836.776	1.462.895.467	0	0	729.923.324.262	0
3	PT. Sarana Multi Infrastruktur	- PP 43/2020 tentang Perubahan PP 23/2020 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 - Perjanjian Pemberian Pinjaman	30 Desember 2020	1.385.209.034.499	8	0,00%	Percepatan Pemulihan Ekonomi di daerah akibat COVID-19	57.717.047.724	0	230.868.190.896	2.455.860.176	0	0	1.096.623.795.879	0
4	PT. Sarana Multi Infrastruktur	- PP 43/2020 tentang Perubahan PP 23/2020 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 - Perjanjian Pemberian Pinjaman	30 Desember 2020	522.540.798.659	8	0,00%	Percepatan Pemulihan Ekonomi di daerah akibat COVID-19	21.772.533.279	237.881.602	87.090.133.116	926.421.291	0	0	413.440.250.662	0
Jumlah				3.400.836.099.846		0,00%		328.337.292.135	14.553.904.411	566.806.035.144	5.338.846.596	0	0	2.491.138.868.156	0

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

BEY TRIADI MACHMUDIN